

**PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BERDASARKAN WASIAT  
ORANG TUA TERHADAP ANAK - ANAKNYA DITINJAU  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Kel. Sidomulyo Timur Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah  
Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum



**OLEH :**

**ARIANTO RANGKUTI**

**NIM : 10621003711**

**JURUSAN AHWAL-ASSYAKHSIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2013**

## ABSTRAK

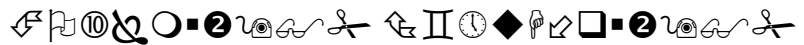
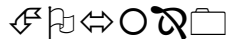
Judul skripsi ini adalah ” Pembagian Harta peninggalan Berdasarkan Wasiat Orang Tua Terhadap Anak-anaknya Ditinjau Menurut Komilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kel. Sidomulyo Timur Pekanbaru)” Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya pembagian harta peninggalan berdasarkan wasiat orang tua terhadap anak – anaknya di Kel. Sidomulyo Timur, serta pelaksanaan pembagian harta peninggalan dan siapa saja yang menjadi ahli waris dan harta apa saja yang di bagikan oleh pewaris.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pewaris, ahli waris, tokoh masyarakat dan perangkat RW/RT. Sedangkan data skundernya adalah berupa literatur – literatur, buku – buku dan tulisan - tulisan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti. Metode pengumpulan data penulis laksanakan dengan cara observasi dan wawancara. Selanjutnya dalam penulisan ini penulis menggunakan metode indukatif, deskriptif dan deskriptif.

Pada masyarakat kel. Sidomulyo Timur mulai dari lingkungan yang terkecil yaitu keluarga sampai kepada lingkungan yang lebih besar yaitu suatu kelurahan, sisitem kekeluargaan dan kekerabatan mengambil dari garis ibu ataupun bapak (Bilateral) di karenakan dengan ada nya percampuran antara kekerabatan Patrinial dan Matrinial. Sehingga sisitem seperti ini sangat memepengaruhi mereka dalam pendistribusian harta peninggalan.

Dari penelitian ini penulis menemukan bahwa pada masyarakat sidomulyo timur mempunyai alasan mengapa masyarakat Kel. Sidomulyo Timur membagikan harta peninggalan berdasarkan wasiat orang tua terhadap anak – anaknya. Menurut hemat penulis pelaksanaan pembagian harta peninggalan ini masyarakat Sidomulyo Timur menyalahi dalam segi porsi dari pembagian harta peninggalan terhadap ahli warisnya.

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan atas Rahmat dan karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BERDASARKAN WASIAT ORANG TUA TERHADAP ANAK - ANAKNYA DITINJAU MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kel. Sidomulyo Timur Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru)”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syaria’h Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru.

Dalam penulisan ini, penulis banyak menerima bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan perimakasih yang tak terhingga terutama kepada :

1. Ayahanda Selamat Rangkuti dan almarhumah Ibunda Ratna Dewi yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta do’a bagi kebahagiaan dan kesuksesan ananda.
2. Buat Saudra-saudara ku yakni : Kakak ku Marliani dan abang Iparku Agus Salim Siregar adek – adek ku Aliarpan , Aliarpin Herlina dan Si kecil Siti Juliani, tak terlupa kepada koponakan – keponakan ku tercinta Medi dan Meni yang telah memberi senyum tulus penyemangat diri. Dan juga seluruh keluarga besar penulis.
3. Buat Mande Tisnawati sekeluarga. Bang Hari Marsal, Sri Oktorina Fasha, noni Mutia Fasha terima kasih atas Do’a dan dukungannya .
4. Bapak prof. H. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di Universitas yang kita cintai ini.
5. Bapak Dr.H. Akbarizan, M. Ag. M. Pd. Selaku dekan Fakultas Syaria,ah Dan Ilmu Hukum.

6. Bapak Dr. Yusran Sabili M. A selaku Ketua Jurusan Ahwalul Al- Syakhsyah, Drs. Zainal Aripin M. Ag. Selaku Seketarsi Jurusan Ahwal Al- Syakhsyah.
7. Bapak Ade Fariz Fahrullah M. A selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dan memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Alwal Al- Syakhsyah.
8. Dan seluruh teman – teman yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu terwujudnya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kesalahan, kekurangan dan kehilafan penulis, karena kemampuan dan pengetahuan penulis terbatas. Mudah – mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuanya, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.....

Pekanbaru    Juni 2013

Penulis

ARIANTO RANGKUTI  
10621003711



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II PROFIL KEURAHAN SIDOMULYO TIMUR</b>	
A. Kondisi Geografis dan Demografi .....	16
B. Kondisi Agama Dan pendidikan.....	17
C. Kondisi Sosial dan Budaya .....	20
<b>BAB III AKAD PERPINDAHAN HAK MILIK DAN WAKTUNYA</b>	
A. Pengertian Kewarisan dan Unsur – unurnya .....	23
1. Waris Islam .....	23
2. Waris Adat .....	39
B. Hibah.....	45
C. Wasiat .....	53
<b>BAB IV PREKTEK WASIAT KEPADA AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM</b>	
A. Jumlah Kasus .....	62
B. Alasan Masyarakat Sidomulyo Timur Melakukan Pemindahan Harta Dengan Cara Wasiat	
1. Rasa Belas Kasihan.....	62
2. Menghindari Kesenjangan Ekonomi.....	64
3. Menghindari Pertikaian.....	67

C. Analisa Fiqih.....	71
D. Analisis KHI .....	72
E. Analisis Penelitian .....	74

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel II.1 Penduduk Menurut Usia.....	16
Tabel II.2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	17
Tabel II.3 Penduduk Menurut Agama.....	18
Tabel II.4 Sarana Ibadah .....	18
Tabel II.5 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	19
Tabel II.6 Sarana Pendidikan .....	20



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengalihan hak atas harta dalam masyarakat muslim di Indonesia selain dalam bentuk pewarisan juga dikenal dalam bentuk hibah dan wasiat, permasalahan waris merupakan salah satu aspek penting dalam bidang hukum perdata, khusus dalam pemindahan kepemilikan harta benda perseorangan, maka dari itu setiap individu harus dapat memahami ilmu yang berkaitan dengan peraktek waris serta pembagian syari'ah Islam menetapkan aturan waris, yang dikenal dengan istilah ilmu pembagian waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik dari segi nasab maupun kerabat yang ada, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, besar dan kecil<sup>1</sup>.

Al-Qur'an sendiri menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun<sup>2</sup>. Bagian yang harus diterima semua telah dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah ia berstatus sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Oleh karena itu, Al-Qur'an dijadikan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris. Namun dalam ayat Al-

---

<sup>1</sup> Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Alma'arif, 1975), h.22

<sup>2</sup> Ibnu Rusyd, penterjemah, M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang: As-Syifa, 1990), h. 462

Qur'an sendiri sedikit sekali yang merinci suatu hukum secara detail, maka sebagai pelengkap untuk menjabarkannya adalah dengan sunnah Rasul (*hadits*) beserta hasil ijtihad ulama terkemuka.

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia hingga saat ini belum mempunyai unifikasi hukum. Karena hukum yang ada di Indonesia beragam dan pastinya masyarakat Indonesia sendiri mengikuti hukum yang berlaku, yaitu hukum Barat (hukum positif), Islam dan Adat. Akibatnya sampai saat ini pengaturan masalah waris di Indonesia belum mempunyai kesamaan.

Adapun bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan, Sedangkan sistem kekeluargaan yang ada pada masyarakat Indonesia menarik dari sebuah garis keturunan. Secara umum, garis keturunan yang ada pada masyarakat Indonesia dikenal dengan tiga macam sistem keturunan, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal dan sistem bilateral.<sup>3</sup>

Dari adanya perbedaan sistem keturunan yang tercantum di atas, menunjukkan bahwa sistem hukum warisnya pun sangat pluralistik. Meski demikian, sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya melihat pada sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga disebabkan oleh adat istiadat masyarakat Indonesia yang bervariasi. Oleh sebab itu, tidak heran jika sistem hukum waris adat yang ada juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan system kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut. Begitu pula dengan hukum waris Islam dan hukum waris Barat (hukum

---

<sup>3</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h 5

positif) yang mempunyai corak dan sifat berbeda dengan hukum waris adat, Karena sumber dari ke dua hukum tersebut berbeda, hukum waris Islam berdasar pada kitab suci Al-Qur'an, sedang hukum waris Barat peninggalan zaman Hindia Belanda bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek*).<sup>4</sup>

Selain mengenal hukum kewarisan, masyarakat muslim juga mengenal sistem pengalihan yang disebut hibah. Hibah merupakan pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain ketika ia masih hidup<sup>5</sup>. *Hibah* yang berkaitan dengan kewarisan adalah pemberian sejumlah harta yang dapat menjadi modal dasar dalam membina rumah tangga yang diberikan seseorang kepada orang yang berhak menjadi ahli waris bila penghibah meninggal dunia. Pemberian yang demikian, biasa disebut permulaan pewarisan dalam hukum adat<sup>6</sup>. Selain itu, hibah yang diberikan kepada orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan penghibah, dan hibah yang diberikan kepada orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan penghibah tetapi tidak dapat dijadikan modal kerja, maka tidak disebut hibah yang berkaitan dengan kewarisan, tetapi hanya disebut pemberian biasa (*hibah*).

Pemberian (*hibah*) yang disebutkan di atas, dapat dibedakan atas pemberian sejumlah barang tertentu yang dilakukan oleh seorang ayah atau ibu kepada beberapa orang anaknya, dan pemberian seluruh harta kekayaan oleh seorang ayah atau ibu kepada semua orang yang berhak menjadi ahli waris bila ia meninggal dunia.

---

<sup>4</sup> Ibid.,h 7

<sup>5</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) h. 466

<sup>6</sup> Oumar Salim, *Dasar – dasar Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) h. 85

Kedua bentuk hibah di atas, seperti telah diuraikan sebelumnya sebagai permulaan pewarisan<sup>7</sup>. Demikian pula, jika ahli waris sudah mendapat bagian tertentu melalui hibah, seperti rumah, ternak, kebun, dan sebagainya. Pemberian itu sudah diperhitungkan sebagai pembagian harta warisan tidak dilakukan lagi karena pengaturan harta benda tersebut sudah sesuai dengan kehendak si pewaris ketika ia masih hidup. Selain itu, kalau pada saat meninggalnya orang tua masih ada sisa harta yang telah dihibahkan dan masih ada ahli waris yang masih kurang bagiannya atau belum mendapatkan hibah, maka dalam pembagian harta warisan akan diseimbangkan bagian diantara ahli waris.

Selain hibah hukum Islam juga mengenal system pengalihan harta peninggalan melalui wasiat, wasiat merupakan pengalihan dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup<sup>8</sup>, berarti wasiat merupakan suatu penetapan yang dilakukan oleh seseorang tentang bagaimana harta peninggalannya harus dibagi oleh ahli warisnya ketika ia meninggal dunia. Wasiat juga dapat dilakukan kepada sejumlah harta tertentu untuk ahli waris tertentu atau orang lain, dan dapat juga dilakukan kepada seluruh harta untuk semua ahli waris bila ahli waris itu menyetujuinya. Tidak menutup kemungkinan harta yang diwasiatkan dapat diberikan kepada orang yang tidak termasuk ahli waris seperti anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin. Selain itu, dapat juga berwasiat kepada lembaga-lembaga social keagamaan, misalnya lembaga yang pernah berjasa kepada pewasiat atau kepada masjid-masjid, madrasah-madrasah, dan sebagainya.

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, h. 467

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *Op.Cit*, h. 455

Wasiat tidak mensyaratkan bentuk tertentu, baik wasiat secara lisan maupun wasiat secara tulisan, tetapi yang penting syarat-syarat materialnya terpenuhi yakni disetujui oleh ahli waris<sup>9</sup>. Dalam praktiknya, secara umum wasiat diucapkan secara lisan pada saat-saat terakhir masa hidup pemilik harta dengan menyatakan kehendaknya tentang harta peninggalannya. Pernyataan itu disaksikan oleh para ahli waris, atau disampaikan kepada orang tertentu yang telah memiliki kepercayaan dari para ahli waris.

Jika dilihat dari bentuknya, wasiat dilakukan oleh seseorang dengan sejumlah harta tertentu, dan wasiat tersebut hanya sebagian dari jumlah keseluruhan harta milik pewasiat yang ditujukan kepada ahli waris tertentu. Bila dihubungkan dengan pembagian harta warisan tampak bahwa wasiat ini tidak berkaitan dengan pelaksanaan hukum kewarisan dan tidak dianggap sebagai permulaan pembagian warisan. Sedangkan wasiat yang dilakukan oleh seseorang dengan keseluruhan harta yang kelak menjadi harta peninggalan pewasiat bila ia meninggal dunia dan semua ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan memperoleh harta melalui wasiat. Hal ini berkaitan dengan pembagian harta warisan bila semua ahli waris menyetujuinya.

Melihat fenomena yang terjadi, peneliti tertarik dengan adanya model pembagian harta peninggalan berdasarkan wasiat orang tua terhadap anak - anaknya yang terjadi di Kel.Sidomulyo timur Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru. Perlu diketahui, dalam fenomena model pembagian harta peninggalan yang terjadi di Kel.Sidomulyo timur Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru menganut salah satu

---

<sup>9</sup> Sulaiman Rasjid , *Fiqh Islam*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994) h. 372

sistem keturunan yang ada di Indonesia yaitu sistem bilateral, dikarenakan masyarakat Kel. Sidomulyo sudah bercampur baur antara satu suku dengan suku yang lainnya maka oleh karena itu hukum adat antara masing-masing tidak digunakan lagi sistem bilateral ini menarik garis keturunan bapak maupun ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak membedakan ahli waris dari pihak ibu dan pihak bapak, Dalam hukum Adat pembagian harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris bukan bagian-bagian yang ditentukan oleh angka, melainkan berdasarkan unit per unit (satuan benda), Hal ini dimaksudkan agar supaya ahli waris (anak-anak) mengetahui dengan pasti bagian yang menjadi haknya, Masyarakat Kel. Sidomulyo memang berpegang teguh pada agama Islam, mereka mengerti ketentuan pembagian harta peninggalan (waris, hibah dan wasiat) yang ada dalam hukum Islam, namun dalam setiap keluarga mempunyai keinginan dan keyakinan masing-masing dalam pembagiannya, sehingga sangat beragam, ada keluarga yang menganut pembagian waris dua banding satu (2:1) ada pula yang membaginya sama rata (1:1) dan ada pula yang membagi hartanya yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi ahli waris.

Pembagian harta peninggalan tersebut telah dilakukan melalui wasiat dan hibah ketika pewaris masih hidup, dan dilakukan dengan musyawarah keluarga (bersama ahli waris). Dalam pembagiannya pun disaksikan langsung oleh para ahli waris, sehingga tahu bagian masing-masing yang mereka peroleh. Meski demikian pewaris tetap memanggil perangkat RT/RW sebagai saksi adanya pelaksanaan pembagian waris dalam keluarga tersebut, sehingga apabila terjadi sengketa antar

ahli waris kita dapat memanggilnya kembali sebagai saksi dari pihak luar keluarga, Adapun cara pembagian waris tersebut disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi ekonomi ahli waris, Bagi mereka yang memiliki pekerjaan tetap (PNS), akan mendapatkan sedikit dari harta warisan, begitupun sebaliknya bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap akan mendapat bagian waris lebih banyak.

Sebagaimana yang terjadi dalam keluarga bapak Agung yang mempraktikkan pembagian harta peninggalan dengan wasiat.

“Bpk Agung berpesan kepada anak – anak nya (Dodi, Indra dan selvi) menyangkut bagian masing – masing mempertimbangkan tingkat ekonomi mereka. Karena anak pertama (Dodi) telah bekerja sebagai PNS di salah satu dinas di kota Pekanbaru dan anak kedua (indra) bekerja sebagai pegawai kontrak di salah satu Mall di Pekanbaru, anak kedua saya (Indra) saya wasiatkan rumah keluarga dan rumah petak yang telah saya bangun sebanyak 4 pintu, tapi pengolahan rumah petak nya itu nanti setelah saya (pewasiat) meninggal dunia. Berbeda dengan anak pertama saya (Dodi) dia tidak saya beri rumah tapi hanya sebidang tanah untuk perumahan, dan anak saya yang perempuan saya berikan juga sebidang tanah untuk perumahan, dikarenakan ia telah menikah dan ikut suaminya serta telah bekerja sebagai Bidan”<sup>10</sup>

Pembagian harta sama rata di praktikkan oleh keluarga ibu Tati dan ibu Elfi, ibu Tati mengatakan :

“saya dan adik saya (Elfi) mendapat warisan orang tua berupa rumah yang

---

<sup>10</sup> Bpk Agung, pewaris, Sidomulyo 14 Febuari 2013

perolehan nya sama rata, pemberian warisan ini beralasan karena kami (ibu Tati dan ibu Elfi) sama – sama perempuan dan pekerjaan kita berdua sama – sama sebagai pengajar, bedanya Elfi mengajar di sekolah dasar dan saya mengajar di SMP.”<sup>11</sup>

Bpk Abdul Halim mengatakan: “ saya (bpk Halim) telah menghibahkan harta saya kepada kedua anak saya (Fauzan dan Yosdi), Fauzan sudah saya beri kebun dan Yosdi saya buat rumah, sedangkan Fauzan selama ini tinggal satu rumah dengan saya, karena Fauzan tidak punya usaha lain selain jualan tahu di pasar maka saya beri modal untuk usaha pesewaan sound sistem, sengaja saya tidak membuatkan Fauzan rumah karna nantinya rumah yang di tempati sekarang akan milik fauzan.”<sup>12</sup>

Ahli waris yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, tentunya tidak mempunyai melatar belakang adanya pembagian ini, karena pewaris berasumsi bahwa seorang pegawai akan memperoleh pendapatan yang pasti dalam setiap bulannya, Lain hal nya dengan penghasilan yang tetap juga, Meskipun pembagian harta peninggalan di atas dilakukan melalui musyawarah dan atas kesepakatan keluarga, namun tidak menutup kemungkinan nantinya akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh para ahli waris, seperti timbul perselisihan atau terjadi sengketa antar ahli waris, apabila terjadi hal-hal demikian, mereka menyelesaikannya dengan cara seperti semula dilakukannya pembagian waris, yaitu diselesaikan dengan musyawarah sesama ahli waris, dengan memanggil perangkat RT/RW sebagai saksi yang hadir ketika pelaksanaan pembagian waris

---

<sup>11</sup> Ibuk Tati, pewaris, Sidomulyo 18 Febuari 2013

<sup>12</sup> Bpk Abdul Halim, Pewaris, Sidomulyo 18 Febuari 2013



berlangsung, namun ketika usaha musyawarah ini gagal, baru permasalahan diajukan ke pengadilan.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pembagian harta peninggalan yang ada. Maka dalam penelitian nanti, peneliti menggunakan judul **“PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BERDASARKAN WASIAT ORANG TUA TERHADAP ANAK-ANAKNYA DITINJAU MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kel. Sidomulyo Timur Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru) ”**

## **B. Batasan Masalah**

Dalam sebuah penelitian perlu adanya batasan masalah, agar dalam penelitian nanti penulis dapat fokus pada pokok permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Tentunya dalam penelitian ini hanya akan membahas beberapa permasalahan tentang pembagian harta peninggalan yang meliputi waris, hibah dan wasiat.

## **C. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, sebab suatu masalah merupakan obyek yang hendak diteliti dan perlu dicari pemecahannya. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, peneliti menganggap perlu memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut

1. Apa alasan dan pemikiran orang tua memberikan wasiat terhadap anak – anaknya ?
2. Bagaimana pembagian harta peninggalan setelah meninggal nya si pewasiat

pada masyarakat kel. Sidomulyo timur ?

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta peninggalan berdasarkan wasiat orang tua terhadap anak – anak nya di Kel.sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian di dalam karya ilmiah merupakan sebuah target yang hendak dicapai melalui beberapa langkah penelitian. Tujuan merupakan sebuah cita-cita yang diinginkan dalam setiap usaha, karena sebuah usaha tidaklah ada artinya tanpa ada tujuan yang pasti.

1. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar pemikiran orang tua yang memberikan wasiat terhadap anak-anaknya di Kel.Sidomulyo Timur Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui langkah/cara pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Kel. Sidomulyo Timur untuk menghindari konflik antar ahli waris dalam pembagian harta peninggalan.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta peninggalan berdasarkan wasiat di Kel.sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur bagi peneliti selanjutnya, khususnya dalam penelitian waris. Memberikan kontribusi wacana ilmiah bagi pengembangan atau pengetahuan, khususnya dalam ilmu waris.

## 2. Secara praktis

- a. Sebagai kontribusi pemikiran bagi mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai sumbangsih pengetahuan bagi masyarakat Pekanbaru pada umumnya dan masyarakat Sidomulyo Timur khususnya, tentang pembagian harta peninggalan yang tidak berdasarkan pada hukum Islam.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field risearc* ) yang mengambil lokasi wilayah di Kelurahan Sidomulyo Timur Pekanbaru

### **2. Subyek dan Obyek Penelitian**

- a. Subyek penelitian ini adalah masyarakat yang telah membagikan harta warisan di kelurahan Sidomulyo Timur Pekanbaru.
- b. Obyek penelitian ini adalah pembagian harta peninggalan berdasarkan wasiat orang tua terhadap anak – anaknya dalam masyarakat Kelurahan Sidomulyo Timur.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah setiap masyarakat yang melakukan

pembagian harta peninggalan berdasarkan wasiat di Kelurahan Sidomulyo Timur Pekanbaru. Karena populasinya tidak di ketahui secara pasti, maka penulis menggunakan metode *purfisive sampling*, yang mana peneliti menetapkan sendiri jumlah sampel dalam penelitian. Oleh karnanya, penulis menetapkan 10 keluarga yang menjadi sampel.

#### **4. Sumber Data**

Dalam penelitian ini di peroleh dari sumber data sebagai berikut:

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diambil dari keluarga yang telah melakukan pembagian harta peninggalan berdasarkan wasiat yang berdomisili di Kel. Sidomulyo Timur Pekanbaru.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data pendukung yang di peroleh penulis dari berbagai pihak Tokoh masyarakat, data base kantor Kelurahan Sidomulyo Timur Pekanbaru, buku – buku perpustakaan dan sumber penting yang berhubungan dengan penelitian.

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka di perlukan metode pengumpulan data, baik dalam bentuk primer maupun sekunder. Adapun metode – metode tersebut adalah sebagai berikut:

##### **a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung gejala atau**

fenomena yang terjadi di lapangan.

- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan penulis terhadap masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Sidomulyo Timur.

## **6. Metode Analisa Data**

Adapun data yang telah terkumpul di analisa melalui analisa data kualitatif, yaitu analisa dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut, kemudian diuraikan, dibandingkan, dan di hubungkan satu dengan yang lainnya dengan sedemikian rupa sehingga di peroleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan di teliti.

## **7. Metode Penulisan**

Dalam penulisan ini menggunakan tiga metode penulisan:

- a. Metode Induktif, yaitu dengan mengumpulkan pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metod Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan kaedah-kaedah yang bersifat umum yang untuk diuraikan dan diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Metode Deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dan mengemukakan permasalahan secara obyektif lalu dianalisa secara kritis, sehingga dapat di susun sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam mempelajari materi skripsi ini, penting adanya dicantumkan sebuah sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini dapat ditulis dalam sebuah paparan sebagai berikut:

**Bab I:** Pendahuluan ini akan di deskripsikan secara umum keseluruhan isi dan maksud dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah agar penulis dapat lebih fokus pada tujuan penelitiannya, setelah dituliskan rumusan masalah baru dijabarkan manfaat penelitian yang mengarah pada rumusan masalah di atas, metode penelitian, dan selanjutnya sistematika pembahasan berisikan bab dan materi (teori-teori) yang menunjang tentunya berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas. Hal ini dikarenakan materi isi dalam bab ini merupakan pijakan awal atau kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dari penelitian, sehingga dari bab ini bisa dilihat ke arah mana penelitian akan dituju.

**Bab II:** Mengenai gambaran umum tentang lokasi penelitian geografis dan demografis, Agama dan pendidikan, sosial budaya dan kondisi perekonomian.

**Bab III :** Kajian teoritis yang di dalamnya mencakup pengertian waris, wasiat dan hibah beserta dasar hukum dan penyelenggaraannya.

**Bab IV:** Pembahasan, terdiri atas pembagian harta peninggalan berdasarkan wasiat orang tua terhadap anak-anaknya, alasan orang tua

memberikan wasiat, pembagian harta peninggalan setelah meninggalnya si pewasiat serta pandangan hukum islam terhadap pembagian harta peninggalan berdasarkan wasiat orang tua di Kel. Sidomulyo Timur Kec Marpoyan Damai Pekanbaru.

**Bab V:** Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **PROFIL KEURAHAN SIDOMULYO TIMUR**

#### **A. Kondisi Geografis dan Demografi**

Provinsi Riau merupakan salah satu dari 33 provinsi di Indonesia yang memiliki geografis strategis, karena berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia, dan secara tidak langsung berbatasan dengan beberapa Negara Asean, serta berada dilintasan pelayaran perdagangan internasional, mulai dari selat Malaka sampai ke laut Cina Selatan. Luas Provinsi Riau 107.932, 89 km<sup>2</sup>, terdiri atas lautan/perairan seluas 21.467,82 km<sup>2</sup> (19,89%), dan kawasan daratan seluas 86.464,89 km<sup>2</sup> (80,11%).<sup>1</sup> Provinsi Riau terletak 1.310' bo BT – 2.25 0'bo BT.

Setelah pemekaran wilayah Kabupaten dan Kota, sebagaimana tertuang dalam undang – undang Nomor 12 Tahun 2009, saat ini Povinsi Riau memiliki 10 daerah Kabupaten dan dua daerah Kota, 151 Kecamatan, 1654 Kelurahan/Desa.

Pekanbaru merupakan Ibu Kota dari Provinsi Riau, yang terdiri dari dari 12 ( Dua Belas ) Kecamatan yaitu:(1) Senapelan, (2) Pekanbaru Kota, (3) Lima Puluh, (4) Sail, (5) Sukajadi, (6) Rumbai, (7) Tampan, (8) Bukit Raya, (9) Marpoyan Damai, (10) Tenayan Raya, (11) Payung Sekaki, (12) Rumabai Pesisir.

Kelurahan Sidomulyo timur merupakan dalah salah satu kelurahan di kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Kelurahan

---

<sup>1</sup> Ahmad Yusuf dkk, *Sejarah Perjuangan Masyarakat Riau*, (Pekanbaru: Unri Pers, 2004), h.408



Sidomulyo Timur memiliki luas 2400M2, yang meliputi 12 Rukun Warga (RW), 56 Rukun Tetangga (RT), dan 5295 Kepala Keluarga (KK).

Adapun penduduk yang berdomisili di kelurahan Sidomulyo Timur berdasarkan umur dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel II. 1**  
**Penduduk Menurut Usia**

No	Usia	Jumlah Penduduk
1	0 – 12 bulan	282 Jiwa
2	1 – 5 Tahun	701 Jiwa
3	5 – 10 Tahun	933 jiwa
4	10 – 15 Tahun	904 Jiwa
5	15 Tahun keatas	18.363 Jiwa
6	Jumlah Penduduk	21.183 Jiwa

*Sumber Data: Monografi Kelurahan Sidomulyo Timur Tahun 2013*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa penduduk kelurahan Sidomulyo Timur menurut usia adalah 0 – 12 bulan berjumlah 282 jiwa, 1 – 5 tahun berjumlah 701 jiwa, 5 – 10 tahun berjumlah 933 jiwa, 10 – 15 tahun berjumlah 904 jiwa, 15 tahun keatas berjumlah 18.363 jiwa. Sehingga apabila dilihat dari tabel berikut jumlah keseluruhan masyarakat kelurahan Sidomulyo timur yang terbanyak adalah yang berumur 15 tahun keatas yang berjumlah 18.363 jiwa dari jumlah keseluruhan nya 21.183 jiwa.

**Tabel II.2**  
**Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki – laki	9.847 Orang
2	Perempuan	11.336 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>21.183 Orang</b>

*Sumber Data: Monografi Kelurahan Sidomulyo Timur 2013*

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa di Kelurahan Sidomulyo Timur jumlah antara laki – laki dan perempuan hampir berimbang, namun lebih banyak

perempuan yang berjumlah 11.336 orang sedangkan laki – laki berjumlah 9.847 orang.

Kelurahan Sidomulyo timur merupakan daerah perumahan yang cukup padat, sehingga menyebabkan pola kehidupan penduduk di daerah ini terfokus kepada keahlian dalam bidang kepegawaian dan mampu untuk membuat usaha, baik dalam bidang perkantoran maupun wiraswasta, sebahagian kecil masarakat bermatapencaharian sebagai petani.

Karena itu, sektor pendidikan dan kemampuan untuk berwiraswata menjadi andalan masyarakat di daerah ini. Disamping itu, di kelurahan Sidomulyo Timur juga terdapat satu perkantoran yang cukup besar yaitu kantor PT. Nusantara Lima.

## **B. Kondisi Agama Dan pendidikan**

Mayoritas penduduk di Kelurahan Sidomulyo Timur beragama Islam, meskipun masih dijumpai agama selain Islam, seperti Kristen, Hindu dan Bhuda sebagai mana terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II.3**  
**Penduduk Menurut Agama**

<b>No</b>	<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
1	Islam	18.142 Orang
2	Kristen Protestan	1.645 Orang
3	Kriten Katolik	1.211 Orang
4	Hindu	144 Orang
5	Budha	39 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>21.183 Orang</b>

*Sumber Data: Monografi Kelurahan Sidomulyo Timur 2013*

Berdasarkan tabel di atas, masyarakat yang bergama Islam berjumlah 18.142 orang, Kristen Protestan berjumlah 1.645 orang, kristen Katolik berjumlah 1.211 orang, Hindu berjumlah 144 orang, budha berjumlah 39 orang. Dari tabel diatas maka mayoritas penduduk di kelurahan Sidomulyo Timur beragama Islam dari jumlah keseluruhan penduduk yaitu 21.183 orang.

Masyarakat kelurahan Sidomulyo Timur termasuk penganut agama yang ta'at, hal ini dapat dilihat bahwa hampir di setiap RT terdapat Masjid ataupun Mushallah yang dijadikan tempat ibadah dan acara keagamaan lainnya, termsuk tempat bermusyawarah untuk kemajuan agama Islam. Jumlah tempat beribadah di Kelurahan Sidomulyo Timur dapat dilihat dari tabel dbawah ini:

**Tabel II.4**  
**Sarana Ibadah**

<b>No</b>	<b>Sarana Ibadah</b>	<b>Jumlah</b>
1	Masjid	17 Unit
2	Gereja	2 Unit
3	Kuil / Wihara	0 Unit
4	Pura	0 Unit
<b>Jumlah</b>		<b>19 Unit</b>

*Sumber Data: Monografi Kleurahan Sidomulyo Timur 2013*

Berdasarkan tabel diatas bahwa sarana ibadah berjumlah 19 unit yang diantaranya 17 unit masjid dan 2 unit gereja.

Pembangunan sarana ibadah ini pada umumnya swadaya masyarakat, dan sebagaian kecil bantuan dari pemerintah seperti Departemen Agama, Walikota dan dari pihak Kecamatan.

Pendidikan memang berperan sangat penting bagi kemjuan satu bangsa dan merupakan suatu cara untuk meningkatkan kecerdasan manusia.maka

pendidikan merupakan aspek yang sangat penting untuk di tingkatkan, Untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas, baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Untuk menciptakan sumberdaya manusia yang handal tidak cukup hanya dengan pendidikan tanpa di dukung dengan keinginan yang kuat dan minat serta bakat masyarakat terhadap pendidikan. Di bawah ini tabel tentang pendidikan penduduk kelurahan Sidomulyo Timur:

**Tabel II.5**  
**Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Belum Sekolah	3 Orang
2	Tdk Tamat/Tamat SD	769/1.126 Orang
3	Tamat SLTP	2.495 Orang
4	Tamat SMA	7.076 orang
5	Tamat AKD /PT	3.282 Orang
6	Buta Huruf	24 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>21.183 Orang</b>

*Sumber Data: Monografi Kelurahan Sidomulyo Timur 2013*

Berdasarkan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan bahwa yang belum sekolah berjumlah 3 orang, tidak tamat SD/Tamat SD 769/1.126 orang, tamat SLTP/ sederajat berjumlah 2.495 orang, tamat SMA sederajat 7.076 orang, tamat AKD/PT berjumlah 3.282 orang dan masih ada yang buta huruf sebanyak 24 orang.

Pembangunan yang sedang di laksanakan di Indonesia tidak akan terwujud bila sumberdaya manusia nya tidak dipersiapkan dengan baik. Disisi lain pendidikan merupakan cara yang ampuh dalam mempersiapkan tenaga kerja yang profesional. Dengan tingkat pendidikan yang semakin baik setiap orang akan mendapat secara langsung memperbaiki tingkat kehidupannya ke arah yang lebih

baik. Tabel berikut ini dapat dilihat dan di peroleh gambaran tentang jumlah sarana / lembaga pendidikandi Kelurahan Sidomulyo Timur:

**Tabel II.6**  
**Sarana Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Sarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	SMU	1 Unit
2	SMP	1 Unit
3	SD	7 Unit
4	TK	8 Unit
5	AKD/PT	0 Unit
<b>Jumlah</b>		<b>17 Unit</b>

*Sumber Data: Monografi Kelurahan Sidomulyo Timur 2013*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana pendidikandi Kelurahan Sidomulyo Timur adalah sebagai beriku, SMU sebanyak 1 unit, SMP sebanyak 1 unit, SD sebanyak 7 unit, TK sebanyak 8 unit sedangkan AKD/PT belum ada di Kleurahan Sidomulyo timur.

### **C. Kondisi Sosial dan Budaya**

Masyarakat kelurahan Sidomulyo Timur dari budaya yang di bawa dari luar daerah masing – masing sepertti Batak, Minang, Jawa dan lain – lain. Namun masyarakat asli Sidomulyo Timur mempunyai kesamaan sistem kekeluargaan dan perikatan antar daerah, dan masyarakat yang berlainan sistem sangat menghargai budaya yang bersifat hitrogen tersebut, karena masyarakat menganggap itu adalah masalah budaya.

Adapun adat dan tradisi yang berlaku di daerah ini banyak di pengaruhi oleh nilai – nilai keagamaan yang di anut, terutama agama Islam.

Dalam pergaulan sosial kehidupan sehari – hari, tradisi di praktekkan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk rumah tangga

misalnya, orang harus mengikuti ajaran agama dan aturan adat sekaligus, yang mana yang satu dengan yang lain saling melengkapi.

Dewasa ini terutama di era kemajuan sains dan teknologi, ketika masyarakat telah ikut memanfaatkan produk – produk teknologi modren seperti teknologi komunikasi yang membawa dampak terhadap perubahan pandangan hidup sebagian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pola hidup masyarakat yang konsumtif.

Disamping itu, disisi lain terjadinya pergeseran nilai norma dalam bidang etika dan moral, terutama dalam kehidupan sosial generasi muda. Jika pada dua daswarsa yang lalu pergaulan antar generasi muda antara lawan jenis dalam prakteknya generasi muda terlihat sangat menghargai nilai – nilai adat dan agama. Hanya saja dengan adanya perkembangan zaman dan kemajuan dalam teknologi sehingga pergeseran tersebut du jumpai, yang mana sebahagian generasi muda dalam pergaulannya yang selalu mengikuti aturan – aturan dan norma – norma agama serta adat istiadat dianggap kurang dengan konsep masyarakat modren.

Dari sini dapat di klasifikasikan bahwa ada dua kolompok masyarakat dalam menyikapi adat yang berkembang, yaitu:

1. Kelompok yang masi mendukung dan mengharapkan serta berusaha menjaga kelestarian adat istiadat yang telah di wariskan.
2. Kelompok yang beranggapan bahwa adat tidak perlu di pertahankan, karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang serba canggih seperti sekarang ini.

### **BAB III**

#### **AKAD PERPINDAHAN HAK MILIK DAN WAKTUNYA**

Dalam sebuah kajian teori akan ditulis materi-materi yang berhubungan dengan penulisan naskah skripsi yang membahas pembagian harta peninggalan orang tua terhadap anak-anaknya melalui waris, hibah dan wasiat, tentunya materi yang akan ditulis berkaitan dengan permasalahan di atas. Diantaranya berisi tentang pengertian waris, hibah dan wasiat perspektif Islam dan adat, dan akan mencantumkan dasar hukum yang mendukung baik dari Al Qur'an dan Hadits, begitu pula ketentuan siapa-siapa yang berhak mendapatkan warisan berikut bagian-bagian yang diperoleh ahli waris, serta tata cara pelaksanaan waris, hibah dan wasiat dalam hukum Islam dan Adat.

#### **A. Warisan**

##### **1) Pengertian Warisan dalam Islam**

Kata waris berasal dari bahasa Arab *mirats* bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang yang telah meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya<sup>1</sup>. Pengertian ini mempunyai cakupan yang lebih luas, karena tidak hanya menyangkut harta benda saja, melainkan juga mengenai ilmu atau kemuliaan.

Pengertian waris menurut istilah adalah perpindahan pemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup,

---

<sup>1</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 1

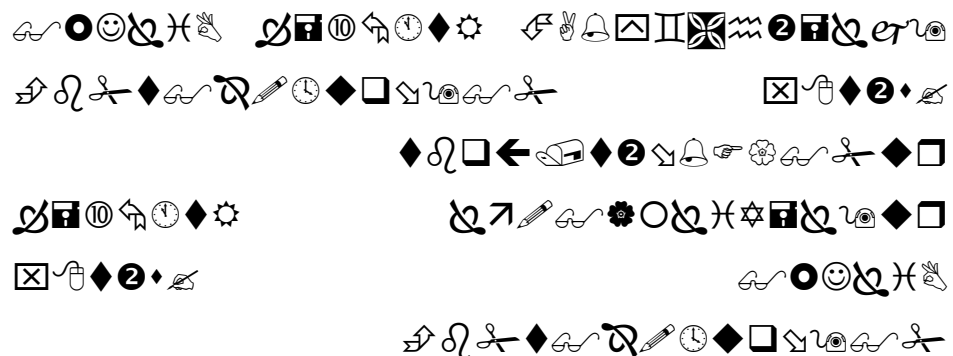
baik berupa uang, barang-barang kebutuhan hidup.<sup>2</sup>

Hukum waris Islam sendiri mempunyai arti aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta, peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.

## 2) Sumber Hukum Warisan Islam

Dalam menguraikan prinsip-prinsip waris berdasarkan hukum Islam, dalam hal ini satu-satunya sumber tertinggi adalah Al-Qur'an, dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul atau *hadits* beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya ahli hukum Islam terkemuka<sup>3</sup>. Berkaitan dengan hal tersebut, di bawah ini akan diuraikan beberapa ayat suci Al-Qur'an yang merupakan sendi utama pengaturan warisan dalam Islam. Ayat-ayat tersebut secara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al-Qur'an, masing-masing tercantum dalam Surat

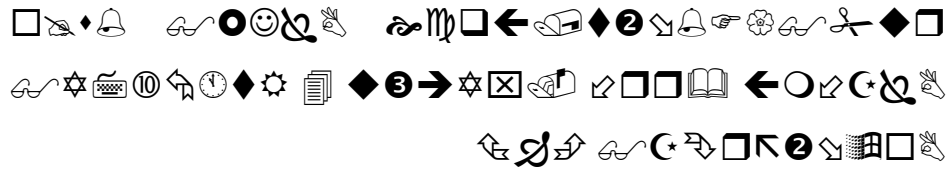
An-Nisa' (QS. IV: 7) yang berbunyi:



<sup>2</sup> Amir Syrifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 6

<sup>3</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.





Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan<sup>4</sup>.*

### 3) Sebab-sebab Adanya Hak Waris

Sebab-sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris:

#### a) Hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan adalah hubungan darah atau hubungan famili<sup>5</sup>. Hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak mewarisi jika salah satu meninggal dunia, seperti kedua orang tua, dan saudara, paman, dan seterusnya.

#### b) Perkawinan

Yaitu terjadinya akad nikah secara legal (*syar'i*) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

#### c) Wala'

Yaitu kekerabatan karena sebab hukum.<sup>6</sup> Penyebabnya adalah

<sup>4</sup>Depag RI, *Al-qur'an dan terjamahnya*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 78

<sup>5</sup> Suhrwardi k Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 55

<sup>6</sup> Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al Ma'arif, 1981) h.113

karena tuannya telah memberikan kebebasan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, dengan syarat budak yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan maupun karenaperkawinan.

#### 4) Rukun Waris

Rukun waris diantaranya adalah:

##### a) Pewaris

Yaitu orang yang meninggal dunia dan akan memindahkan harta peninggalannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris)<sup>7</sup>.

##### b) Ahli Waris

Ahli waris yaitu orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia karena sebab-sebab tertentu, seperti karena hubungan kekeluargaan, perkawinan dan sebagainya<sup>8</sup>.

##### c) Warisan

Yaitu, suatu barang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa uang, barang-barang kebutuhan hidup seperti rumah, kendaraan dan sebagainya. Barang yang akan diwariskan

---

<sup>7</sup> Badriah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 52

<sup>8</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 134

dapat disebut warisan, harta peninggalan dan sebagainya.<sup>9</sup>

## 5) Syarat Waris

Syarat-syarat waris diantaranya adalah:

### a) Kematian

Yaitu meninggalnya seseorang yang akan mewariskan harta peninggalannya secara hakiki atau secara hukum. Harta peninggalan tidak mungkin dapat dibagi-bagikan sebelum pewaris dinyatakan meninggal dunia<sup>10</sup>. Jika seseorang hilang sehingga tidak diketahui keadaan sebenarnya, maka untuk menentukan statusnya apakah ia masih hidup ataukah sudah mati, dapat ditentukan berdasarkan keputusan hakim dengan bukti-bukti yang autentik. Setelah ada keputusan hakim tentang kematian seseorang, barulah harta peninggalannya dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.

### b) Ahli waris harus masih hidup

Para ahli waris harus benar-benar masih hidup ketika orang yang memberi warisan (pewaris) meninggal dunia<sup>11</sup>. Ketentuan ini merupakan suatu syarat mutlak agar seseorang berhak menerima, warisan. Sebab orang yang sudah meninggal tidak mendapatkan warisan karena orang yang sudah meninggal dunia tidak mampu lagi untuk membelanjakan hartanya, baik yang diperoleh karena pewarisan atau sebab-sebab lainnya.

### c) Mengetahui status kewarisan.

---

<sup>9</sup> Fathurrahman *Op.Cit.* hal 36

<sup>10</sup> Ahmad Rafiq, *Op.Cit*, h. 22

<sup>11</sup> Fathurrahman, *Op. Cit*, h. 79

Posisi dari masing-masing ahli waris, harus diketahui secara pasti, sehingga bagian yang diperolehnya pun sesuai dengan ketentuan ilmu *faraidh*<sup>12</sup>. Sebab ketentuan hukum pewarisan selalu berubah-ubah sesuai dengan tingkatan ahli waris. Kita tidak hanya cukup mengatakan: “Si fulan saudaranya orang yang meninggal dunia”. Dalam hukum pewarisan harus dijelaskan, apakah ia saudara seayah seibu, karena Para ahli waris mempunyai hukum pewarisan tersendiri. Ada diantara mereka yang mempunyai hak mewaris dengan bagian tetap, mewaris dengan sistem *ashobah*, ada yang terhalang dan ada pula yang tidak terhalang. Oleh karena itu, posisi dari masing-masing ahli waris harus diketahui dengan jelas dan pasti.<sup>13</sup>

#### 6) Penghalang Hak Waris

Dalam hukum waris Islam ada beberapa hal yang dapat menjadikan penghalang hak waris, antara lain: a. pembunuhan, b. perbudakan, c. perbedaan agama, d. murtad<sup>14</sup>

##### a) Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan.

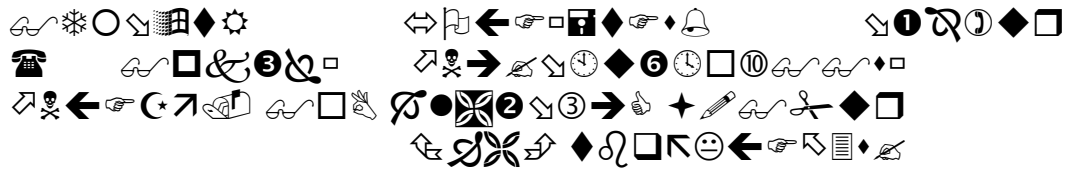
Dilarangnya membunuh untuk mewarisi, seperti dilarangnya orang yang membunuh anak perempuannya untuk mendapatkan warisan. Dalam kisah yang tercantum dalam surat Al Baqarah ayat 72

---

<sup>12</sup> Sudarsono, *Hukum Waris Dalam Sistem Bilateral*, ( Jakrata: Rineka Cipta, 1991), h. 93

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal. 210

<sup>14</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 351



Artinya: *Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama Ini kamu sembunyikan.*<sup>15</sup>

#### b) Perbedaan Agama

Yang dimaksud halangan perbedaan agama disini ialah antar orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi; artinya seorang muslim tidak mewarisi pewaris yang non muslim; begitu pula non muslim tidak mewarisi harta pewaris yang muslim.

Adapun yang menjadi dasar dari halangan ini hadist Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim yang maksudnya: “seorang yang yang non-muslim tidak mewarisi sorang muslim dan muslim tidak mewarisi non-muslim”.<sup>16</sup>

### 7) Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar, golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu:

- a) *Dzul faraaidh*. (ahliwaris yang bagiannya di tentukan dalam Al Qur'an)<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Depag RI, *Op.Cit.*, h. 11

<sup>16</sup>Amir syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 192

<sup>17</sup> Moh Anwar, *Hukum Waris Dalam Islam*, ( Surabaya: Al Ikhlas, 1981), h. 25

Yaitu ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan dalam Al-Qur'an, yakni ahli waris langsung yang mendapat bagian tetap dan tidak berubah-ubah. Adapun rincian masing-masing ahli waris yang ditentukan dalam Al-Qur'an tercantum dalam surat An-Nisaa ayat 11, 12, dan 176.



Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-

*masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>18</sup>*

Q. IV : 11, itu sesudah dipisah – pisahkan antara garis hukum menurut hukum kewarisan berbunyi sebagai berikut:

- a) Dalam garis ke bawah: Anak perempuan dan cucu dari anak laki-laki
- b) Menurut garis ke atas: Ayah, Ibu, Kakek dari garis ayah dan nenek dari garis ayah maupun dari garis ibu
- c) Menurut garis ke samping: Saudara perempuan seayah dan seibu dari garis ayah, saudara perempuan tiri dari garis ayah, saudara laki-laki dan perempuan tiri dari garis ibu.
- d) Duda
- e) Janda<sup>19</sup>
- b) *Ashabah*

*Ashabah* dalam bahasa Arab berarti “Anak Maki dan kaum kerabat dari pihak bapak.” *Ashabah* menurut ajaran kewarisan patrilineal Syafi’i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi bagian ahli waris yang terlebih dahulu

<sup>18</sup> Depag RI, *Op.Cit.*, h. 78

<sup>19</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h.

dikeluarkan adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan didalam Al-Qur'an, kemudian sisanya baru diberikan kepada *ashabah*. Dengan demikian, apabila ada pewaris yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris *dzul faraaidh* (ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam Al Qur'an), maka harta peninggalan diwarisi oleh *ashobah*. Akan tetapi jika ahli waris *dzul faraaidh* (ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam Al Qur'an) itu ada, maka sisa bagian *dzul faraaidh* menjadi bagian *ashabah*.<sup>20</sup>

Hazairin dalam bukunya “Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an,” membagi ahli waris *ashabah* menjadi tiga golongan, yaitu: *ashabah binafsihi* (*asabah* dengan sendirinya), *asabah bilghairi* (*asabah* bersamaan), dan *ashabah ma'al ghairi* (diberikan kepada orang perempuan tertentu). *Ashabah*-*ashabah* tersebut menurut M. Ali Hasan dalam bukunya Hukum Warisan dalam Islam, terdiri atas:

- 1) *Ashabah binafsihi* yaitu *ashabah*-*ashabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut: Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah dalam pertalian laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asalkan pertaliannya belum putus dari pihak ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak kandung saudara laki-laki sekandung, anak kandung saudara laki-laki

---

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 76



seayah, paman kandung, paman seayah, anak kandung laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah<sup>21</sup>.

- 2) *Ashabah bilghairi* yaitu *ashabah* dengan sebab orang lain<sup>22</sup>, yakni seorang wanita yang menjadi *ashabah* karena ditarik oleh seorang laki-laki, adalah sebagai berikut: anak perempuan didampingi oleh anak laki-laki, saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki
- 3) *Ashabah ma'al ghairi* yakni saudara perempuan yang mewarisi bersama keturunan perempuan dari pewaris, mereka adalah. Saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seayah
- 4) *Dzul Arhaam*

Arti kata *dzul arhaam* (orang yang mempunyai hubungan darah) adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja. Hazairin dalam bukunya Hukum Kewarisan Bilateral memberikan perincian mengenai *dzul arhaam*, yaitu: semua orang yang bukan *dzul faraaidh* dan bukan *ashabah*, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota keluarga pihak ayah dan ibu.

Sajuti Thalib dalam bukunya "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia" menguraikan tentang *dzul arhaam*, antara lain cucu melalui anak perempuan. Menurut kewarisan patrilineal tidak

---

<sup>21</sup> Ahmad Rafiq, *Op.Cit.* h. 60

<sup>22</sup> Sudarsono, *Op.Cit.* h. 120

menempati tempat anak, tetapi diberi kedudukan sendiri dengan sebutan *dzul arhaam* atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, tetapi agak jauh. Akibat dari pengertian ini maka *dzul arhaam* juga dapat mewaris jika sudah tidak ada *dzul faraaaidh* dan tidak ada pula *ashabah*. Selain cucu melalui anak perempuan, yang dapat digolongkan sebagai *dzul arhaam* adalah anggota keluarga yang penghubungnya terhadap keluarga itu seorang wanita.<sup>23</sup>

#### 8) Bagian Masing-Masing Ahli Waris *Dzul faraaaidh*

##### 1) Ahli waris yang memperoleh bagian seperdua<sup>24</sup>.

a) Suami, apabila tidak ada anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki.

b) Anak perempuan, apabila tidak ada anak laki-laki yang mendapat bagian *ashobah* dan tidak lebih dari satu orang (anak perempuan tunggal).

Anak perempuan tidak dapat memperoleh bagian separuh, jika ada anak laki-laki yang mendapat bagian *ashobah*. Sebab jika ia memperoleh bagian separuh berarti bagiannya sama dengan bagian anak laki-laki, bahkan bisa lebih.

c) Cucu perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menjadikannya sebagai *ashobah*, tidak lebih dari satu orang (tunggal), dan tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki.

---

<sup>23</sup> Sajuti Thalib, *Op.Cit*, h. 82

<sup>24</sup> Moh Anwar, *Op.,.Cit*, h.69

- d) Saudara perempuan sekandung, apabila tidak ada saudara laki-laki sekandung yang membuatnya menjadi *ashobah*, tidak lebih dari satu orang (tunggal), pewaris (almarhum) tidak mempunyai orang tua dan tidak mempunyai anak.
  - e) Saudara perempuan seayah, apabila tidak ada saudara laki-laki seayah yang menjadikannya sebagai *ashobah*, tidak lebih dari satu orang (tunggal), pewaris tidak mempunyai orang tua atau anak sama sekali, dan tidak mempunyai saudara perempuan sekandung.
- 2) Ahli waris yang memperoleh bagian seperempat<sup>25</sup>.
- a) Suami, apabila ada anak laki-laki atau cucu anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
  - b) Istri, apabila tidak ada anak atau cucu dan seterusnya ke bawah.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa bagian istri atau beberapa istri (lebih dari satu) tetaplah satu kesatuan dan tidak mengalami perubahan. Di sisi lain, para ulama berpendapat bahwa apabila ada empat orang istri yang masing-masing mendapatkan bagian seperempat, maka seluruh harta peninggalan suami sudah habis dibagikan kepada semua istrinya. Oleh karena itu, meskipun jumlah istri lebih dari seorang, maka bagiannya tetaplah seperempat.

- 3) Ahli waris yang memperoleh bagian seperdelapan<sup>26</sup>
- a) Istri atau beberapa orang istri, apabila ada anak laki-laki atau cucu

---

<sup>25</sup> Sulaiman Rasjid, *Op.Cit*, h. 365

<sup>26</sup> Ahmad Rafiq, *Op.Cit*, h.57

dari anak laki-laki.

- 4) Ahli waris yang memperoleh bagian dua pertiga
  - a) Dua orang anak kandung perempuan atau lebih, apabila: tidak ada anak laki-laki yang menjadikannya sebagai *ashobah*.
  - b) Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, apabila tidak ada anak laki-laki, tidak ada dua anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki yang dapat menjadikannya sebagai *ashobah*,
  - c) Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, apabila tidak ada anak laki-laki dan bapak atau kakek (orang tua), tidak ada saudara yang membuat mereka menjadi *ashobah* yaitu saudara laki-laki sekandung, Tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki baik satu atau lebih.
  - d) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, apabila tidak ada anak laki-laki, ayah atau kakek, tidak ada saudara yang menjadikannya *ashobah* yaitu saudara laki-laki seayah, tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, atau saudara sekandung (baik laki-laki maupun perempuan).

Ketentuan ini berdasarkan pada Ijma' ulama. Sebab dalam hal ini yang dimaksud dengan saudara perempuan adalah meliputi saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah. Sedangkan saudara perempuan seibu tidak termasuk dalam ketentuan

ini.<sup>27</sup>

- 5) Ahli waris yang memperoleh bagian sepertiga
  - a) Ibu, apabila tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  - b) Dua orang saudara seibu atau lebih (laki-laki / perempuan) baik sekandung, seayah, atau seibu.
- 6) Ahli waris yang memperoleh bagian seperenam
  - a) Ibu, jika meninggalkan anak, cucu, dua orang saudara atau lebih.
  - b) Ayah, jika mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  - c) Nenek, ibu dari bapak
  - d) Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, bersamaan dengan seorang anak perempuan.
  - e) Kakek, orang tua laki-laki dari bapak bersamaan dengan anak atau cucu, bila ayah tidak ada
  - f) Seorang saudara seibu (laki-laki atau perempuan)
  - g) Saudara perempuan seayah, (seorang atau lebih) bersamaan dengan seorang saudara perempuan kandung

## 9) Cara Pelaksanaan pembagian Waris Islam

Menurut jumhur fuqaha bahwa hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalan adalah sebagai berikut:

### 1) Biaya Perawatan

---

<sup>27</sup>Hasbi Ash-shiddiqi, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1973), h. 75

Biaya perawatan yang dimaksud adalah biaya-biaya perawatan yang diperlukan oleh orang yang meninggal, dimulai sejak saat meninggalnya sampai saat penguburannya<sup>28</sup>.

## 2) Pelunasan Utang-utang

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, utang-utang si pewaris terlebih dahulu harus dilunasi. Utang dapat di klasifikasikan menjadi dua macam kategori, utang kepada Allah dan utang kepada sesama manusia.

## 3) Melaksanakan Wasiat

Sisa harta warisan setelah diambil untuk menyelesaikan tiga hal yang berhubungan dengan orang yang meninggal, selanjutnya adalah pembagian harta kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'at berikut ini.

### a) Mendahulukan Biaya Perawatan jenazah daripada Utang

Biaya perawatan jenazah itu harus didahulukan daripada pelunasan utang-utangnya, sebelum harta itu dibagikan kepada ahli warisnya<sup>29</sup>. Menurut logika, bahwa perawatan jenazah, seperti biaya memandikan, mengafani, dan menguburkannya termasuk kebutuhan vital baginya sebagai pengganti nafkah *daruriyah* ketika masih hidup, sedangkan nafkah daruriyah harus didahulukan daripada pelunasan utang kepada siapapun ketika masih hidup maka begitu juga seharusnya

---

<sup>28</sup> Ahmad Rafiq, *Op.Cit*, h. 37

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 38

setelah mati.

b) Mendahulukan Utang daripada Pelunasan Wasiat

Pelunasan utang itu harus didahulukan daripada pelaksanaan wasiat, Menurut logika, wasiat dapat berfungsi sebagai *tabarru'* (suatu perbuatan yang dilakukan secara sukarela) untuk mewujudkan amal-amal kebajikan, baik dalam memenuhi kewajiban bersama, seperti memberikan bagian' kepada cucu-cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada orang yang mewariskan (wasiat wajibah), maupun untuk memenuhi kewajiban terhadap Tuhan, seperti memenuhi pembayaran zakat dan sebagainya.

c) Mendahulukan Wasiat daripada Membagi Harta Peninggalan kepada Ahli Waris, Wasiat harus didahulukan daripada pembagian harta peninggalan kepada ahli waris<sup>30</sup>.

## 1. Waris Adat

### a. Pengertian Hukum Waris Adat

Sebelum penulis memberikan pengertian hukum waris adat terlebih dahulu akan dikemukakan pendapat para ahli mengenai hal yang dimaksud, diantaranya sebagai berikut.

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele*

---

<sup>30</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), Cet. Ke-4, h. 388

*goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.<sup>31</sup>

Berdasarkan definisi hukum waris adat di atas, penulis berkesimpulan bahwa hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pemindahan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan hak-hak, kebendaan (materi dan non materi).

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat cara-cara ketentuan tentang system dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana hartawarisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

## **b. Asas-asas Hukum Waris Adat**

### **1) Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri**

Asas ketuhanan dan pengendalian diri yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu untuk mewujudkan ridha Tuhan bila seorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris untuk menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi harta warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta warisan karena

---

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), h. 259



perselisihan diantara para ahli waris memberatkan pedalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukanlah suatu tujuan tetapi yang penting adalah menjaga kerukunan hidup diantara para ahli waris dan semua keturunannya.

## 2) Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta pemnggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.

## 3) Asas Kerukunan Dan Kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan.

## 4) Asas Musyawarah Dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila tedadi kesepakatan dalam

pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat Lulus ikhlas yang di kemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pads setiap ahli waris.

#### 5) Asas Keadilan

Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.

### c. Sistem Kewarisan Adat di Indonesia

Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum waris adat juga mengenal beberapa sistem kewarisan, antara lain :

- 1) Sistem kewarisan individual atau perseorangan adalah sistem kewarisan di mana setiap ahli waris mendapatkan bagian waris untuk dikuasai dan dimiliki menurut bagiannya masing-masing<sup>32</sup>. Kelebihan dari sistem kewarisan individual antara lain ialah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka ahli waris dapat bebas menguasai danmemiliki harta warisan bagiannyatanpa dipengaruhi anggota keluarga yang lain. Sedang kelemahannya ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat

---

<sup>32</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.151

menimbulkan rasa ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.

- 2) Sistem kewarisan kolektif adalah sistem kewarisan yang menentukan para ahli waris untuk mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama, sebab harta peninggalan yang diwarisi tidak dapat dibagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Kelebihan sistem ini adalah harta waris yang ada dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup para ahli waris untuk sekarang dan masa mendatang dan menumbuhkan sikap tolong menolong antara satu dengan yang lain. Kelemahan sistem ini adalah dapat menimbulkan rasa kesetiaan pada kerabat bertambah luntur karena para kerabat tidak dapat bertahan mengurus kepentingan bersama itu dengan baik.
- 3) Sistem kewarisan mayorat juga merupakan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta di limpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pengganti kepala keluarga. Kelebihan dan kelemahan sistem ini adalah dilihat dari kepemimpinan anak tertua, apabila anak tertua yang bertanggung jawab, ia akan memanfaatkan harta kekayaan untuk kepentingan semua anggota keluarga, begitupun sebaliknya.<sup>33</sup>

#### **d. Ahli waris Menurut Hukum Adat Di Indonesia**

Menurut hukum adat di Indonesia, dengan beberapa variasi dan deferensasi antara daerah lingkungan hukum data yang satu dengan yang lain, sebab sebab mewarisi itu ialah:

---

<sup>33</sup>*Ibid*, h. 152

### 1) Keturunan.

Keturunan yang disini yang di utamakan ialah anak, anak sebagai ahli waris utama mempunyai ketentuan yang berbeda – beda memngingat perbedaan sifat kekeluargaan di berbagai daerah.<sup>34</sup>

- a) Pada daerah yang sifat kekeluargaannya berdasarkan “parenteel” (ibu-bapak), anak – anak yang dilahirkan menjadi ahli waris.
- b) Pada daerah yang sifat kekeluargaannya berdasarkan “matriarchaat” (garis ibu) atau “patriarchaat” (garis bapak) maka hal waris anak sebagai ahli waris di batasi.<sup>35</sup> Di minangkabau anak – anak tidak menjadi ahli waris dari bapaknya, sebab mereka masuk kedalam keluarga ibunya dan di Tapanuli anak – anak tak dapat mewarisi ibunya.

Disamping itu ada beberapa variasi, bahwa anak laki – laki tertualah, di Bali (*patriarchaat*), yang dapat mewarisi seluruh harta peninggalan dengan dibebani kewajiban memelihara adik – adiknya. Di Batak, sering terjadi anak laki – laki termuda yang mewarisi seluruh harta peninggalan orang tuany. Di Suvu (*parenteel*), hanya anak perempuan saja yang mewarisi harta peninggalan ibunya dan haya anak laki-laki saja yang dapat mewarisi harta peninggalan bapaknya. Di samping anak pewaris, harta peninggalan itu dapat juga di warisi oleh anak cucu silsilah si pewaris. Jika anak anak-anak dan cucu cucunya tidak ada sama sekali maka orang tua dari sipewaris

---

<sup>34</sup> B Ter Haar, Penterjemah, Soebakti Poesponoto, *Asas – asas Dan Susunan Hukum Adat*, ( Jakarta: Pradya Pramita, 1987), h.14

<sup>35</sup> Fathurrahman, *Op.Cit*, h.27

yang berhak atas harta peninggalannya, apa bila orang tua itu sudah wafat terlebih dahulu, maka yang berhak adalah saudara – saudara kandung pewarislah yang berhak atas harta peninggalan sipewaris.

## 2) Perkawinan.

Seorang istri yang ditinggal mati suaminya atau seorang suami yang ditinggal mati istrinya dikebanyakan daerah lingkungan adat dianggap sebagai orang asing. Seorang istri yang ditinggal mati suaminya ia hanya dapat turut memiliki mengambil hasil seumur hidup dari harta benda peninggalan suaminya. Seorang suami yang ditinggal mati istrinya (di Minangkabau) tidak menerima apa-apa dari harta peninggalan istrinya. Namun tidak demikian di beberapa daerah lainnya.

## 3) Adopsi.

Anak angkat mempunyai warisan menurut hukum adat sebagai anak turunannya sendiri. Namun kadang – kadang ia dianggap anak asing oleh kerabat – kerabat simait terhadap barang asal dari bapak/ibu angkatnya. Jika anak yang di adopsi itu adalah kemenakannya sendiri maka ia menjadi waris terhadap orang tua yang sebenarnya. Kecuali di Sumatra Selatan hubungan waris dengan orang tua dan kerabatnya sendiri putus.

## 4) Masyarakat daerah

Jika ahli waris tidak ada sama sekali, harta peninggalan tersebut jatuh kepada masyarakat daerah yang meninggal dibawah

kekuasaan kepala masyarakat.<sup>36</sup>

## **B. Hibah**

### **1. Hibah Perspektif Islam**

#### **a. Pengertian Hibah**

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Di samping itu, salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi “hibah, harus masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.”<sup>37</sup>

Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghidiahkan sebagian atau seluruh harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain, yang dikenal dengan sebutan “*Hibah*”, dalam hukum Islam pun tidak membatasi jumlah harta yang akan dihibahkan. Berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih.

Hibah dalam pengertian di atas, merupakan pemberian biasa dan

---

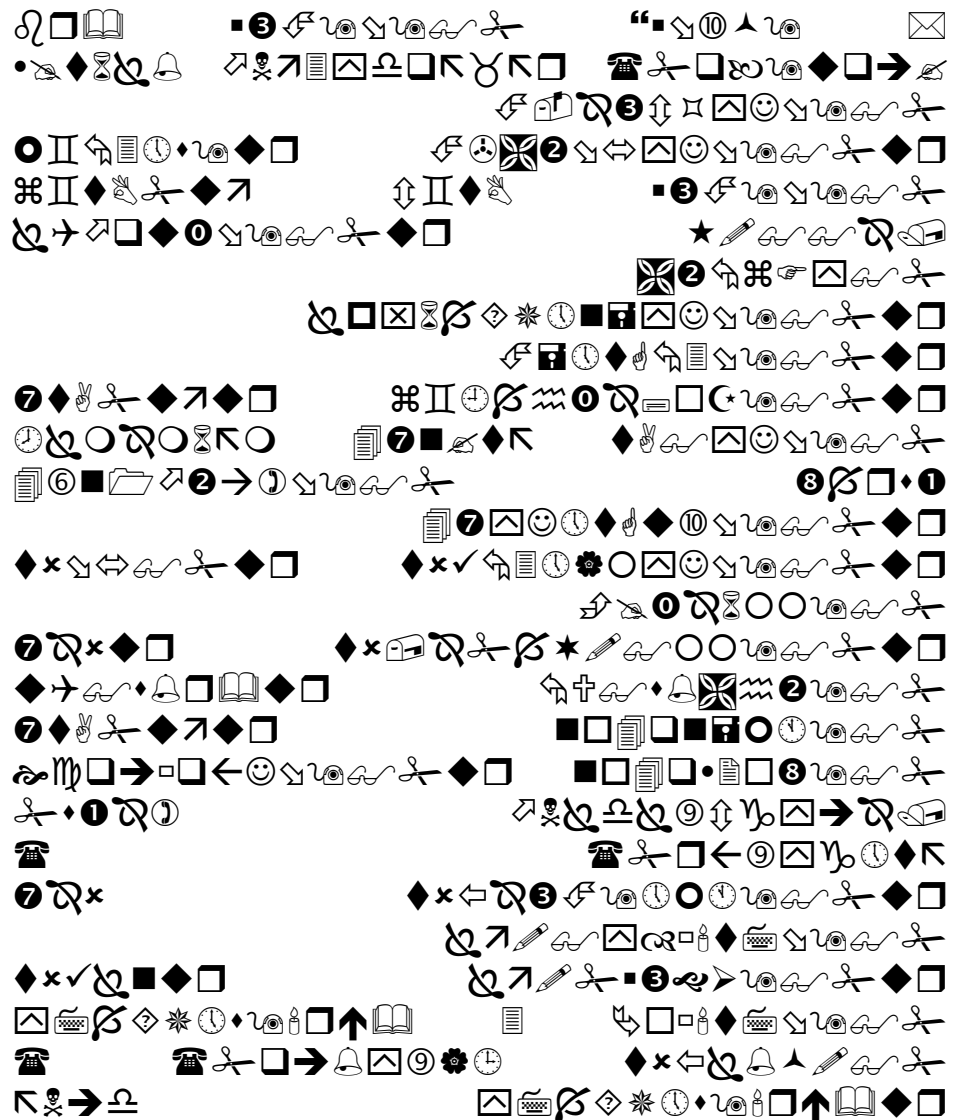
<sup>36</sup> *ibid.*, h. 123

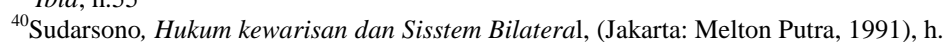
<sup>37</sup> Ibnu Rusyd, penerjemah Abdurrahman, *bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa’ 1990), h. 432

tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan, Pengkategorian itu tampak bahwa hibah adalah jenis pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika ia masih hidup, sedangkan warisan baru dapat terlaksana bila calon pewaris telah meninggal dunia.

## b. Dasar Hukum Hibah

Dasar hukum hibah terdapat dalam Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 177 dan Ali Imran ayat 38, beberapa hadis Rasulullah dan pasal 210 sampai 214 Kompilasi Hukum Islam.







- 3) *Qabdlah*, yaitu penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis.

Seseorang yang hendak menghibahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya semasa hidupnya, dalam hukum Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Orang tersebut harus dewasa
- 2) Harus waras akan pikirannya
- 3) Orang tersebut harus; sadar dan mengerti tentang apa, yang diperbuatnya
- 4) Baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan. hibah
- 5) Perkawinan bukan merupakan penghalang untuk melakukan hibah

Tidaklah terdapat persyaratan tertentu bagi pihak yang akan menerima hibah, sehingga hibah dapat saja diberikan kepada siapa pun, hanya ada beberapa, pengecualian, antara lain sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari anak di bawah umur atau orang yang tidak waras itu.
- 2) Bila hibah dilakukan terhadap anak di bawah umur yang diwakili oleh saudaranya yang laki-laki atau oleh ibunya, hibah menjadi batal.
- 3) Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal.

#### **d. Rukun Hibah**

Unsur-unsur kewarisan berbeda dari unsur-unsur hibah (biasa

---

<sup>41</sup>*Ibid*, h. 105

juga disebut rukun hibah). Hibah mempunyai beberapa rukun tertentu, baik pemberi hibah, penerima, hibah, maupun status harta yang dihibahkan.<sup>42</sup> Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Pemberi Hibah

Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa, serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang dihibahkan. Pada dasarnya pemberi hibah adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum.

#### 2) Penerima hibah

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan kepadanya. Penerima hibah diisyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Kalau ia masih di bawah umur, diwakili oleh walinya atau diserahkan kepada pengawasan walinya sampai pemilik hibah cakap melakukan tindakan hukum. Selain itu, penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris atau bukan ahli waris, baik orang muslim maupun non muslim, yang semuanya adalah sah hukumnya.

#### 3) Harta atau Barang yang Dihibahkan

Harta atau barang yang dihibahkan dapat terdiri atas segala

---

<sup>42</sup> Ibnu Rusjid, *Op.Cit*, h.437

macam barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, bahkan manfaat (*hibah umra*) atau hasil sesuatu barang dapat dihibahkan. Selain itu, hibah mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu (1) barang itu nilainya jelas; (2) barang itu ada sewaktu terjadi hibah. Oleh karena itu, bila buah-buahan yang akan dipetik tahun depan atau binatang yang akan lahir, tidak sah untuk dihibahkan; (3) barang itu berharga menurut ajaran agama Islam. Adapun bangkai, darah, babi dan khamar tidak sah dihibahkan; (4) barang itu dapat diserahkan; (5) barang itu dimiliki oleh pemberi hibah.

#### 4) Ijab-Qabul

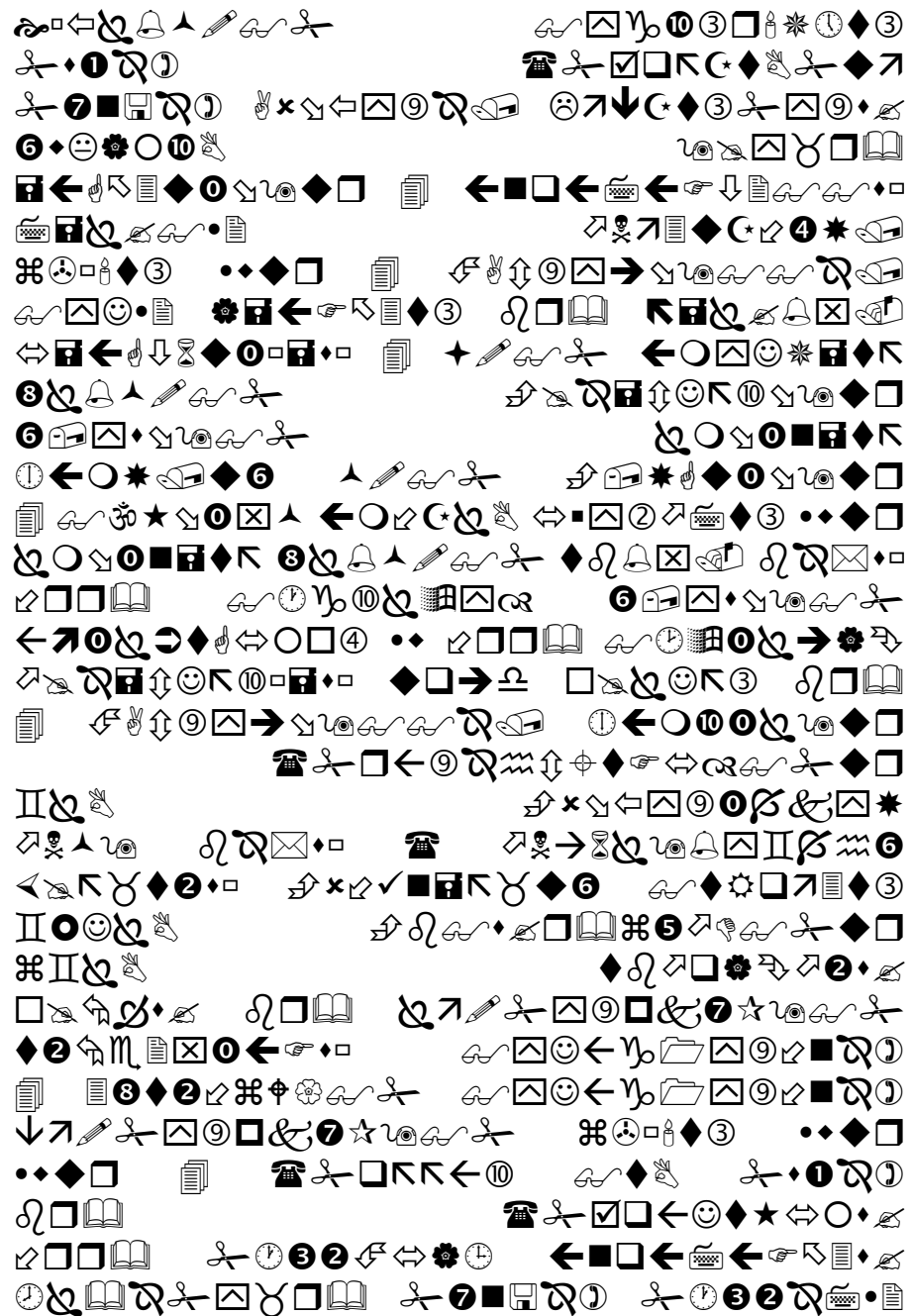
*Ijab qabul* (serah terima) di kalangan ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan *ijab qabul*, yaitu (1) sesuai antara *qabul* dengan *ijabnya qabul* mengikat *Yab*, dan (3) akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung) seperti perkataan: aku hibahkan barang ini padamu, bila si anu datang dari Mekah. Selain itu, hibah pada dasarnya adalah pemberian yang tidak ada kaitan dengan kewarisan, kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris. Dalam hal demikian, perlu ada batas maksimal hibah, tidak melebihi sepertiga harta seseorang, selaras dengan batas wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid* h. 438

### e. Cara Pelaksanaan Hibah Dalam Perspektif Islam

Hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun, untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis sesuai dengan anjuran Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 282.





Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling

*sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*<sup>44</sup>

Hibah dalam Islam pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas bahwa di ibaratkan orang-orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan orang yang muntah lalu ia memakan muntahnya<sup>45</sup>. Namun, ada pengecualian bila hibah yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya dapat dibatalkan atau ditarik kembali selama barang yang dihibahkan itu belum dikuasai oleh pihak ketiga, sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menarik hibahnya kecuali hibah ayah atau ibu kepada anaknya.

Adapun pelaksanaan hibah menurut ketentuan syari'at Islam adalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang di hibahkan.
- 2) Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.
- 3) Beralihnya hak atas barang yang di hibahkan pada saat penghibahan dilakukan.
- 4) Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh si pemberi hibah.
- 5) Penghibahan hendaknya dilaksanakan di hadapan beberapa orang

---

<sup>44</sup> Depag RI, *Op.Cit.*, h.27

<sup>45</sup> Ibnu Rusjid, *Op.Cit*, h. 445

saksi (hukumnya sunnah), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa dikemudian hari.

- 6) Hibah antara suami isteri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang di hibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampaui mahal.

## **C. Wasiat**

### **1. Wasiat Dalam Perspektif Islam**

#### **a. Pengertian Wasiat**

Wasiat adalah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia. Menurut asal hukumnya, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan. Oleh karena itu, dalam syariat Islam tidak ada suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.

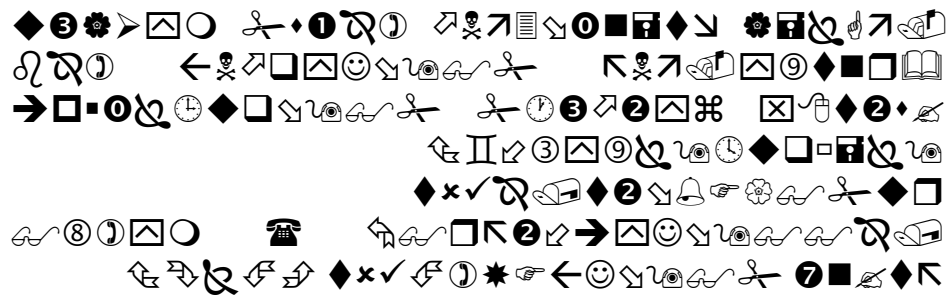
Dalam buku *Fiqh Islam* karangan Sulaiman Rasjid menuliskan bahwa hukum wasiat adalah sunhat. Sesudah Allah menerangkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta pusaka, dijelaskan bahwa pembagian harta pusaka tersebut harus dijalankan.<sup>46</sup>

#### **b. Dasar Hukum Wasiat**

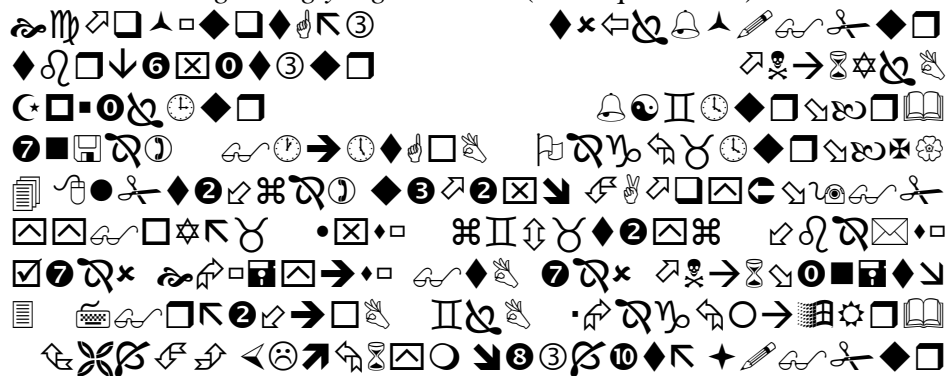
Dasar hukum pelaksanaan wasiat dapat dilihat dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat, 180 dan 240 sebagai berikut:

---

<sup>46</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet. 37; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), 371



Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.* (Al Baqarah: 180)<sup>47</sup>



Artinya: *Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*<sup>48</sup> (AlBaqarah: 240)

Kewajiban berwasiat yang terdapat dalam ayat 180 di atas, dilihat dari kata *kutiba* yang berarti *furida* (diwajibkan) dan kata *bilma'rufi haqqan 'alal-muttaqin* yang berarti pelaksanaan wasiat itu adalah salah satu syarat taqwa, Karena itu, hukumnya wajib. Kata *khairan* dalam ayat di atas, berarti harta yang banyak, harta yang pantas untuk diwasiatkan,

<sup>47</sup> Depag RI, *Op.Cit.*, h.27

<sup>48</sup> *Ibid*, h.39



atau harta yang memenuhi syarat untuk diwasiatkan.

Para ulama berbeda pendapat. mengenai wasiat, di satu pihak ajaran kewarisan bilateral (Hazairin bersama murid-muridnya) berpendapat bahwa berwasiat kepada ahli waris yang kebetulan ikut mewaris tidak terlarang. Hubungan garis hukum mengenai wasiat dalam Al Qur'an surah An-Nisaa' ayat 11 dan 12 tidak menghapus berlakunya Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 180. Di lain pihak ajaran kewarisan patrilineal (para pengikut mazhab syafi'i) berpendapat bahwa tidak diperbolehkan berwasiat ibu-bapak dan kerabat, bila mereka mendapat bagian warisan dalam suatu kasus kewarisan. Di kemukakan lagi hadis yang isinya mengatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris.<sup>49</sup> Oleh karena itu, ayat-ayat wasiat dihapus oleh ayat-ayat kewarisan.

### c. Syarat Wasiat

Adapun syarat-syarat wasiat sebagai berikut:<sup>50</sup>

#### 1) Syarat-syarat pemberi wasiat

Adalah orang yang memberi wasiat. kepada orang lain untuk mengurus harta sesudah ia meninggal. Untuk sahnya wasiat, pemberi wasiat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Baligh
- b) Berakal sehat
- c) Dengan sukarela atau kemauan sendiri

#### 2) Syarat-syarat penerima wasiat

Adalah orang yang diberi wasiat untuk mengurus harta

---

<sup>49</sup>Ibnu rusyd, penerjemah, Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 451

<sup>50</sup>Sudarsono, *Op.Cit.*, h.107

pewasiat sesudah ia meninggal. Orang yang berwasiat harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Orangnyanya jelas, baik nama maupun alamatnya
- b) Ia ada ketika pemberian wasiat
- c) Cakap menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi wasiat

### 3) Syarat-syarat harta yang diwasiatkan

Harta yang diwasiatkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Hartanya dapat diwariskan atau merupakan barang-barang bernilai.
- b) Sudah ada ketika wasiat itu dibuat
- c) Milik pemberi wasiat itu sendiri

### 4) Syarat-syarat *sighat*

*Sighat* hendaklah menggunakan kata-kata yang tegas menyatakan maksud wasiat. Kata-kata yang menyatakan maksud wasiat, misalnya:

- a) Saya berwasiat kepada saudara agar memberikan seperenam harta peninggalan saya untuk keperluan pembangunan masjid.
- b) Saya percayakan kepada saudara agar memberikan seperempat dari harta peninggalan saya untuk kepentingan madrasah di desa saya.

## **d. Rukun Wasiat**

Wasiat yang telah disebutkan merupakan perbuatan hukum, sehingga mempunyai ketentuan dalam pelaksanaannya. Ketentuan yang demikian, terdiri atas: (1) pemberi wasiat, (2) penerima wasiat, (3) harta

yang diwasiatkan, dan (4) *dab qabul*.<sup>51</sup>

### 1) Pemberi Wasiat

Pemberi wasiat disyaratkan kepada orang dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum, merdeka dalam pengertian bebas memilih, tidak mendapat paksaan. Oleh karena itu, orang yang dipaksa dan orang yang tidak sehat pikirannya tidak sah wasiatnya. Namun, bila wasiat anak-anak yang sudah cakap melakukan perbuatan hukum (*mukallaj*). Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Imam Malik memandang sah kalau anak-anak itu sudah *mumayyiz* (dewasa), tetapi Abu Hanifah tidak membenarkan wasiat anak-anak, baik yang belum *mumayyiz* maupun yang sudah *mumayyiz*.

### 2) Penerima Wasiat

Wasiat dapat ditujukan kepada orang tertentu, baik kepada ahli waris maupun kepada bukan ahli waris. Demikian juga, wasiat dapat pula ditujukan kepada yayasan atau lembaga sosial, kegiatan keagamaan, dan semua bentuk kegiatan yang tidak menentang agama Islam (perbuatan maksiat). Demikian juga halnya, bila wasiat dilakukan kepada seseorang non muslim maka wasiat itu sah bila penerima wasiat (orang yang non muslim) itu berada di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

### 3) Harta atau Barang yang Diwasiatkan

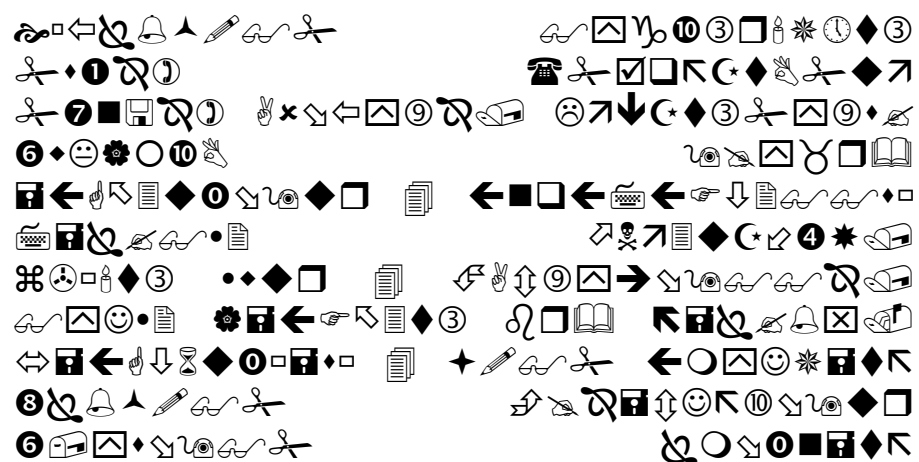
---

<sup>51</sup> Sulaima Rasjid, *Op.Cit*, h.372

Harta atau barang yang di wasiatkan di isyaratkan sebagai harta yang dapat diberikannya hak pemilikannya dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat. Oleh karma itu, tidak sah mewasiatkan harta atau barang yang belum jelas statusnya. Selain itu, harta yang diwasiatkan mempunyai nilai yang jelas dan bermanfaat bagi penerima wasiat, bukan harta yang di haramkan atau membawa kemudharatan bagi penerima wasiat. Namun bila harta yang diwasiatkan sifatnya Samar-Samar, termasuk ikan di empang dan semacamnya, dapat diwasiatkan.

#### 4) Ijab Qabul

*Ijab qabul* adalah serah terima antara pemberi wasiat dengan penerima wasiat yang status pemilikannya berlaku sesudah pewasiat wafat dan disyaratkan melalui lafal yang jelas mengenai barang atau harta yang menjadi objek wasiat, baik secara tertulis maupun secara lisan, yang kemudian disaksikan oleh duaorang saksi.<sup>52</sup> sebagaimana yang tercantum Al Qur'an Sarah Al-Baqarah ayat 282.



<sup>52</sup> Ibnu rusyd, penerjemah, Abdurrahman, *Op.Cit.*, h.456



*seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>53</sup>*

Wasiat yang tersebut di atas, di serahkan kepada penerima wasiat, dan dilakukan sebelum pembagian harta warisan sebagaimana yang disebutkan oleh Al Qur'an Surah An-Nisaa ayat 11, bahwa pembagian harta warisan dilakukan sesudah terpenuhi wasiat dan telah melunasi utang pewaris.

#### **e. Cara Pelaksanaan Wasiat**

Untuk melaksanakan wasiat, haruslah diperhatikan ketentuan berikut.<sup>54</sup>

- 1) Harta peninggalan si jenazah harus diambil lebih dahulu untuk

---

<sup>53</sup> Depag RI, *Op.Cit.*, h.48

<sup>54</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, h.463

kepentingan pengurusan jenazah, seperti membeli kain kafan, biaya pemakaman dan lainnya yang berhubungan dengan pemakaman.

- 2) Harus dilunasi utang-utangnya lebih dahulu jika ia memiliki utang.
- 3) Diambil untuk memenuhi wasiat si jenazah, dan jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan setelah dikurangi untuk keperluan pengurusan jenazah.
- 4) Setelah wasiat dipenuhi, maka harta peninggalannya diwariskan kepada ahli waris yang berhak.

**BAB IV**

**PRAKTEK WASIAT KEPADA AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF**

**FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**A) Jumlah Kasus**

Kelurahan Sidomulyo Timur merupakan salah satu kelurahan di kota Pekanbaru yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 21.183 jiwa, dari sekian jumlah penduduk terdapat 5295 KK ( kepala Keluarga ). Dalam penelitian ini peneliti menetapkan 10 kasus Keluarga yang menjadi obyek penelitian dari sekian banyak nya kasus pembagian harta peninggalan berdasarkan wasiat yang tidak di ketahui secara pasti.

Dari 10 pelaku yang menjadi obyek penelitian ini ada 70% yang mempunyai latar belakang pendidikan sampai tingkat SMA, namun minim sekali pengetahuan mereka tentang kewarisan Islam.

**B) Alasan Masyarakat Sidomulyo Timur Melakukan Pemindahan Harta Dengan Cara Wasiat**

Mengapa wasiat orang tua menjadi dasar dalam pembagian harta peninggalan di Kel. Sidomulyo timur, hal ini di lakukan karena beberapa alasan, diantara nya karena:

**1) Rasa Belas Kasihan**

Data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan informan menyebutkan beberapa alasan mengapa orang tua membagikan harta



peninggalan nya melalui wasiat di Kel. Sidomulyo Timur, salah satunya karena ada rasa belas kasihan sesama ahli waris. Pak Agung mengatakan:

“saya membagikan harta peninggalan saya melalui wasiat kepada anak – anak saya, masing - masing mempertimbangkan kemampuan ekonomi mereka. Anak saya yang pertama dan yang kedua beda bagian nya di karnakan anak pertama saya sudah menjadi PNS, sedangkan anak kedua saya masih pegawai kontrak, maka nya saya kasihan sama anak kedua saya yang belum memiliki penghasilan yang cukup”<sup>1</sup>

Dalam pembagian semacam ini jelas masing – masing keluarga mempunyai tujuan yang mendasar, diantara nya agar tercipta kerukunan dan keadilan antara ahli waris, tidak terjadi perselisihan, tidak iri satu sama yang lain dan saling menghargai.

Dalam hukum adat, alasan yang telah disebutkan informan di atas termasuk sila kedua (sila Kemanusiaan). Penjelasan dari sila kemanusiaan ialah dimana setiap manusia itu harus diperlakukan secara wajar menurut keadaannya sehingga berlaku kesamaan hak dan kesamaan tanggung jawab dalam memelihara kerukunan hidup dalam satu ikatan keluarga. Seperti dalam proses pewarisan, sila kemanusiaan berperan sebagai mewujudkan sikap saling cinta mencintai sesama ahli waris, sikap tenggang rasa dan saling tolong menolong antar yang satu dengan yang lain, dan mewujudkan sikap untuk tidak sewenang – wenang apalagi mengambil atau merebut kepentingan orang lain. Oleh karena itu dalam hukum waris adat sesungguhnya bukan penentuan

---

<sup>1</sup> Bpk Agung, Pewaris, Sidomulyo Timur 14 Feb 2013

banyaknya bagian warisan yang harus diutamakan, tetapi kepentingan dan kebutuhan ahli waris yang dapat di bantu dengan adanya warisan tersebut, karena untuk menciptakan kerukunan tidak harus dilihat dari banyaknya perolehan warisan itu sendiri.

Dalam asas hukum waris adat, alasan diatas termasuk dalam asas kesamaan dan kebersamaan hak, di mana setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisan. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris bukan berarti pembagian harta warisan sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.

## **2) Menghindari Kesenjangan Ekonomi**

Status pekerjaan ahli waris yang PNS dan yang bukan PNS terlihat adanya pendapatan yang tidak seimbang antara ahli waris satu dengan yang lainnya. Karena memang setiap ahli waris ada yang sukses dalam segi ekonomi ada pula yang kurang beruntung, sehingga hal ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial sesama ahli waris, karena status pekerjaan setiap ahli waris berbeda, ada yang berstatus PNS, Wiraswasta, dan karyawan/kuli, sehingga pendapatannya pun berbeda.

Data yang di peroleh dari lapangan tidak tampak adanya kesenjangan sosial yang serius, hanya salah satu informan memiliki persoalan terkait dengan pendapatan ahli waris, sehingga menimbulkan rasa iri di antara anak –

anaknya, seperti yang terjadi pada keluarga Bpk Abd Halim yaitu antara Fauzan dan Yosdi, Bpk Abd Halim mengatakan:

“dalam keseharian mereka (Fauzan dan Yosdi) memang banyak diam dan jarang sekali berkomunikasi, padahal kita tinggal dalam satu lingkungan, entah apa yang di persoalkan padahal mereka (Fauzan dan Yosdi) sudah saya beri bagian, tapi wujud dari bagian itu tidak sama, Fauzan saya berikan kebun dan Yosdi saya buat rumah, sedangkan fauzan selama ini tinggal bersama kami, karena itu sengaja Fauzan tidak saya buat rumah, karena nanti rumah yang kami tempati ini jadi milik Fauzan”<sup>2</sup>

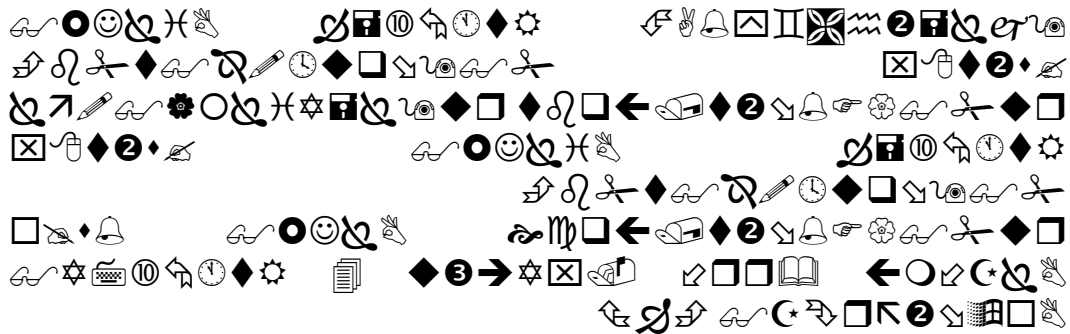
Dalam asas hukum kewarisan Islam yaituasas individual, dengan asas ini di maksudkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam harta warisan dapat dibagi – bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan (pribadi). Untuk itu, dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan di nyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing – masing. Dalam hal ini, setiap ahli waris berhak atas bagian yang di dapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, karena bagian masing – masing sudah di tentukan sebelumnya.

Asas individual hukum kewarisan Islam di peroleh dari kajian aturan Al qur'an terkait dengan pembagian harta warisan, yang terdapat dalam surat An Nisa' ayat 7, secara garis besar telah menjelaskan tentang hak laki – laki untuk menerima warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya. Demikian juga

---

<sup>2</sup> Bpk Abd Halim, Pewaris, sidomulyo 14 Feb 2013

halnya dengan perempuan, berhak menerima harta warisan orang tua atau kerabatnya baik sedikit maupun banyak.



Artinya: Bagi laki – laki ad hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang telah di tentukan.(An Nisa’ Ayat 7)

Praktik pembagian harta peninggalan pada masyarakat Sidomulyo Timur di sesuaikan dengan tingkat perekonomian ahli waris, yaitu antara ahli waris yang menjabat sebagai PNS dan Ahli waris yang bukan PNS. Dari status pekerjaan inilah dapat di tentukan bagian masing – masing ahli waris, bagi ahli waris yang sudah PNS akan mendapat bagian lebih sedikit dari ahli waris yang bukan PNS, pembagian harta peninggalan pun berupa satuan benda (unit per unit) sehingga ahli waris mengetahui bahagian masing – masing dengan pasti.

Dengan adanya perbedaan tingkat perekonomian ahli waris satu dengan yang lain, dapat diambil segi positif dari adanya perbedaan perekonomian tersebut yaitu adanya saling tolong menolong sesama ahli waris yang membutuhkan.

Seperti yang disampaikan oleh informan Bpk Arif<sup>3</sup> dari tiga bersaudara yang paling beruntung adalah kakak saya (Dina) perekonomiannya mapan dan sudah menjadi PNS. Sesama saudara kita harus saling tolong menolong, jika salah satu dari kita membutuhkan bantuan terutama dalam perekonomian selama masih bisa kakak saya membantu ia akan membantu saudaranya, begitupun sebaliknya.”<sup>3</sup>

Sikap tolong menolong termasuk kategori asas hukum waris adat yaitu asas kerukunan dan kekeluargaan, asas dimana para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan. Hal ini juga terdapat dalam sila ke tiga Pancasila yaitu persatuan, dengan sila persatuan ini, dalam ruang lingkup kecil seperti keluarga atau kerabat menempatkan kepentingan kekeluargaan dan kebersamaan sebagai kesatuan masyarakat kecil yang hidup rukun. Kepentingan mempertahankan kerukunan kekeluargaan atau kekerabatan selalu di tempatkan di atas kepentingan kebendaan perseorangan. Demi persatuan dan kesatuan keluarga, maka apabila seorang pewaris wafat bukanlah tuntutan atas harta warisan yang harus segera di selesaikan, melainkan bagaimana memelihara persatuan itu supaya tetap rukun dan damai dengan adanya harta warisan tersebut.<sup>4</sup>

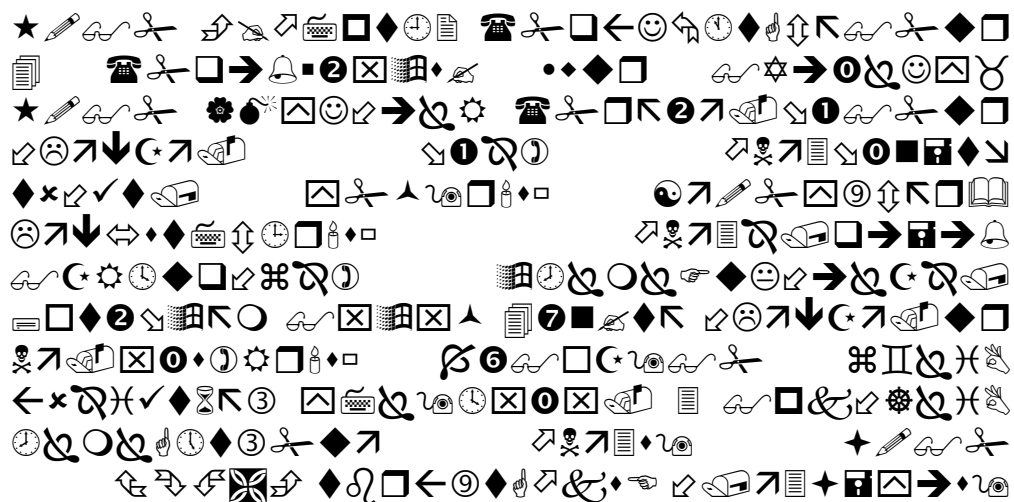
### 3) Menghindari Pertikaian

---

<sup>3</sup> Bpk Arif, Sidomulyo, 15 Feb 2013

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Op, Cit.*, 17

Dalam melakukan pembagian harta peninggalan, penting untuk kita fikirkan apakah nantinya akan menguntungkan ahli waris atau akan menambah permasalahan bagi ahli waris. Karena apabila sudah terjadi sebuah perselisihan apalagi pertikaian diantara mereka, akan timbul dendam, apabila harta warisan akan dilaksanakan akan berakibat timbulnya persengketaan maka hal tersebut akan dapat merusak kerukunan kekeluargaan yang bersangkutan. Didalam Al qur'an surah Ali Imran ayat 103 dikatakan:



Artinya: “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai – berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuh – musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang – orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat – ayat Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.

Pada dasarnya dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan tidak boleh terjadi hal – hal yang memeriksa kehendak antara yang satu dengan yang lainnya atau menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan anggota ahli waris yang lain. Jika terjadi silang sengketa diantara ahli waris maka semua anggota ahli waris baik pria atau wanita, yang tua atau yang muda, tanpa terkecuali

harus menyelesaikan dengan bijaksana yaitu dengan musyawarah mufakat dengan jalan rukun dan damai. Hasil dari kesepakatan musyawarah harus bersifat tulus ikhlas, di kemukakan dengan perkataan yang baik dengan i'tikat baik dari hati nurani yang jujur demi kepentingan bersama dengan berdasarkan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.

Jika akan melakukan pembagian harta peninggalan hendaknya pewaris memahami situasi dan kondisi masing – masing ahli waris, tentunya semua pewaris berkeinginan dalam proses pembagian harta peninggalan tidak kurang dari satu apapun apalagi sampai terjadi konflik. Agar tidak terjadi konflik sesama ahli waris dapat dilakukan dengan beberapa cara di antaranya:

a. Musyawarah

Sengketa harta warisan sering terjadi setelah beberapa lama si pewaris wafat, hal ini dikarenakan masyarakat sudah banyak di pengaruhi alam fikiran yang berhubungan dengan kebendaan, sebagai akibat kemajuan zaman dan timbulnya banyak kebutuhan hidup, sehingga rasa malu, rasa kekeluargaan dan tolong menolong sudah semakin surut.

Dasar untuk menghindari konflik yang terjadi antara ahli waris dalam masalah pembagian harta peninggalan sangat beragam, sebagaimana salah satunya di ungkapkan oleh Ibu Hanifah: “....supaya tidak terjadi kesalah pahaman, saya bilang pada almarhum suami saya kalau mau berwasiat masalah harta kepada anak – anak harus dengan sepengetahuan mereka. Jadi kalau memang di kemudian hari ada permasalahan bisa

diselesaikan sama – sama dengan jalan musyawarah antara keluarga saja sebelum menjadi perkara besar.”<sup>5</sup>

Apabila terjadi sengketa harta warisan biasanya semua anggota keluarga pewaris almarhum berkumpul atau dikumpulkan oleh salah seorang anggota waris yang di segani di rumah pewaris. Pertemuan dapat dipimpin oleh anak tertua laki - laki atau pamandari pihak ayah ataupun pihak ibu menurut susunan kekerabatan yang bersangkutan atau oleh juru bicara yang ditunjuk dan di setuju bersama oleh para anggota keluarga yang hadir, biasanya dipimpin oleh orang yang dianggap tertua dalam keluarga.

Dalam musyawarah keluarga, pimpinan pertemuan mengemukakan masalah yang menjadi persengketaan dengan di dahului oleh petunjuk dan nasehat betapa pentingnya kerukunan dan kedamaian hidup dalam kekeluargaan. Rasa malu, harga diri selalu di kemukakan terlebih dahulu, malu terhadap keluarga tetangga, berat bagi arwah yang telah kembali ke Rahmatullah jika yang di tinggalkan berselisih karena harta warisanya.

b. Menyerahkan Persoalan kepada Pihak RW/RT

Dalam menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan sengketa waris, masyarakat Sidomulyo Timur mempercayakan penyelesaiannya kepada pihak RW/RT setempat. Penyelesaian seperti ini dilakukan oleh keluarga bpk Mora yaitu “antara kedua anak nya ( Pak Ipul dan Bu Fita), dalam ukuran yang telah di bagi kannya, maka mereka menyerahkan kepada pihak RW/RT untuk mengukur kembali ukuran tanah antara mereka yang

---

<sup>5</sup> Ibu Hanifah, Sidomulyo, 25 Feb 2013



sudah ditetapkan dahulu melalui wasiat bapak Mora, agar keduanya sama – sama puas.”<sup>6</sup>

Jika ditemukan persoalan warisan dalam keluarga seperti contoh diatas, tidak serta merta keluarga yang bersangkutan mempercayakan permasalahannya diselesaikan oleh pihak RW/RT, dengan dilakukan musyawarah keluarga terlebih dahulu, baru kemudian persoalan diserahkan pada pihak RW/RT dan apabila pihak RW/RT tidak dapat menyelesaikan persoalan maka persoalannya akan di bawa ke pengadilan itupun atas persetujuan keluarga yang bersangkutan.

### C) Analisis Fiqih

Dasar hukum pelaksanaan wasiat dapat dilihat dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat, 180 dan 240 sebagai berikut:

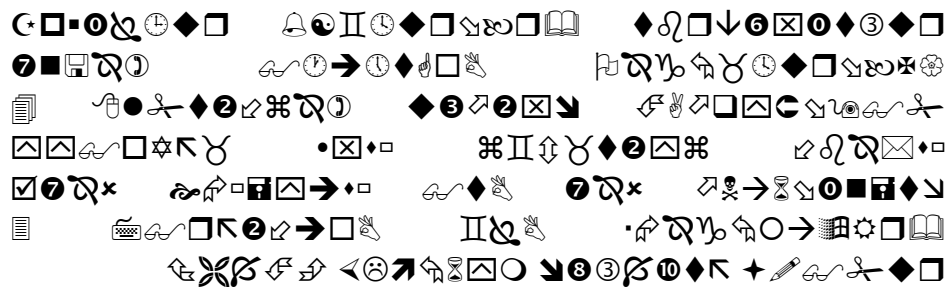


Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*(Al Baqarah: 180)<sup>7</sup>



<sup>6</sup> Bpk Ipul, Sidomulyo, 25 Feb 2013

<sup>7</sup> Depag RI, *Al-qur'an dan terjamahnya*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h.27



Artinya: *Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*(AlBaqarah: 240)

Kewajiban berwasiat yang terdapat dalam ayat 180 di atas, dilihat dari kata *kutiba* yang berarti *furida* (diwajibkan) dan kata *bilma'rufi haqqan 'alal-muttaqin* yang berarti pelaksanaan wasiat itu adalah salah satu syarat taqwa, Karena itu, hukumnya wajib. Kata *khairan* dalam ayat di atas, berarti harta yang banyak, harta yang pantas untuk diwasiatkan, atau harta yang memenuhi syarat untuk diwasiatkan.

Mengenai penerimaan wasiat, fuqaha sependapat bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris berdasarkan sabda Nabi SAW “ tidak ada wasiat bagi ahli waris”( HR. Muslim dan Abu Daud), jika wasiyat itu diberikan kepada ahli waris, maka wasiyat itu tidak boleh dilaksanakan, kecuali telah mendapat izin dari para ahli waris, baik besarnya wasiyat itu kurang dari 1/3 peninggalan, maupun lebih<sup>8</sup>. Dalam masalah ini Ibnu Munzir dan Ibnu ‘abdil Barr mengatakan bahwa pendapat ini telah

<sup>8</sup> Fathchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma'arif, 1975)h. 57

disepakati oleh seluruh Fuqaha, karena Nabi SAW telah melarang memberikan wasiyat kepada ahli waris yang dapat menerima warisan sekiranya tidak mendapat izin dari para ahli waris lainnya.

#### **D) Analisa Kompilasi Hukum Islam**

Salah satu cara untuk menghindari konflik/perselisihan dalam pembagian harta peninggalan pada masyarakat Sidomulyo Timur adalah dengan dibagikan nya harta peninggalan dengan wasiat. Ini di ungkapkan oleh bapak agung yang mempraktekkan pembagian harta peninggalan dengan wasiat, “Bpk Agung membagikan hartanya kepada ahli waris nya berupa benda, agar mereka tau dengan pasti yang mana yang menjadi hak mereka”<sup>9</sup>

Dalam kopilasi hukum Islam tidak mengatur secara khusus penerima wasiat, meskipun demikian, dari pasal 171 huruf (f) dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah (1) orang, dan (2) lembaga, yang dapat disimpulkan wasiat diberikan kepada orang lain atau lembaga. Disamping itu, dari pasal 196 menegaskan bahwa dalam wasiat, baik secara tertulis ataupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas siapa atau siapa – siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Pada dasarnya setiap orang kecuali sipewasiat sendiri dapat menjadi subjek penerima wasiat. Ada beberapa pengecualian sebagaimana tercantum dalam pasal 195 ayat (3), pasal 207 dan pasal 208. Orang – orang yang tidak dapat diberi wasiat adalah:

1. Ahli waris; kecuali wasiat tersebut di setujui oleh semua ahli waris lainnya.

---

<sup>9</sup> Bpk Agung Sidomulyo, 14 Feb 2013

2. Orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia (sipewasiat) menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa
3. Notaris dan saksi – saksi yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat

Wasiat yang di praktekkan oleh keluarga Bpk Agung diberikan kepada anaknya sendiri tepatnya ahli waris, hal ini didasarkan kategori orang yang tidak dapat menerima wasiat yaitu ahli waris, namun ada sebuah pengecualian jika wasiat tersebut di setuju oleh semua ahli waris maka wasiat boleh diberikan untuk ahli waris.<sup>10</sup>

#### **E) Analisis Penelitian**

Dari penjelasan dalam permasalahan diatas, Peneliti berpendapat bahwa Suatu hal yang awalnya berjalan dengan i'tikad baik, maka hal tersebut akan membawa berkah atau keberuntungan bagi yang menjalankannya. Contoh saja dari pembagian harta peninggalan model ini yang terjadi di Kel. Sidomulyo Timur, dari awal telah dilakukan musyawarah untuk mendapat kesepakatan dari ahli waris dan keluarga lainnya untuk membagikan bagian masing – masing dari harta peninggalan orang tua. Jelas tidak mudah untuk menerima kenyataan bahwa bagian yang di terima satu dan yang lainnya berbeda, akan tetapi apabila semua itu di jalankan dengan penuh keikhlasan dan menyadari perolehan bagian masing – masing, dengan begitu kita bisa belajar memaknai kebersamaan, saling menghargai dan akan terciptanya kehidupan yang adil dan rukun antara ahli waris.

---

<sup>10</sup> Depag RI, UU RI NO. 174 tentang Perkawinan dan Kopilasi Hukum Islam, Citra Umbara. Bandung. 2011, hal.298

Hal ini termasuk dalam kategori sila Pancasila yakni sila persatuan, dalam ruang lingkup yang kecil seperti keluarga atau kerabat menempatkan kepentingan kekeluargaan dan kebersamaan sebagai kesatuan masyarakat kecil yang hidup rukun. Kepentingan mempertahankan kerukunan kekeluargaan selalu di tempatkan diatas kepentingan kebendaan perseorangan. Demi persatuan dan kesatuan keluarga maka apabila seorang pewaris wafat bukanlah tuntutan atas harta warisan yang harus segera di selesaikan, melainkan bagaimana memelihara persatuan agar tetap rukun dan damai dengan adanya harta warisan itu. Tidak itu saja, untuk memelihara kerukunan di kemudian hari dilakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum dibagikannya harta peninggalan, agar hubungan kekeluargaan tercipta tentram dan damai dalam mengurus, menikmati dan memanfaatkan harta peninggalan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Alasan masyarakat Kel. Sidomulyo Timur dalam pembagian harta peninggalan dengan dasar wasiat orang tua antara lain: karena adanya rasa belas kasihan antara ahli waris, untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi antara ahli waris karena status pekerjaan mereka sebagai PNS dan bukan PNS, untuk menghindari pertikaian antara ahli waris.
2. Beberapa cara/langkah untuk menghindari konflik dalam pembagian harta peninggalan pada masyarakat Sidomulyo Timur, yaitu dengan dilakukannya pembagian harta peninggalan dengan wasiat orang tua dengan pertimbangan kemampuan ekonomi ahli waris, dengan musyawarah keluarga, dan menyerahkan persoalan kepada pihak RW/RT setempat.

#### **B. Saran – saran**

1. Kepada masyarakat Sidomulyo Timur disarankan bahwa ketentuan Allah Atau Sari'at Islam itu lebih baik dari segala – galanya. Khusus kepada pembagian harta peninggalan bahwa Al quran sudah menetapkan bahagian – bahagian setiap ahli waris.
2. Khusus bagi kita masyarakat muslim, bahwa ketetapan dan keputusan yang terdapat di dalam adat atau trdisi dapat dilaksanakan selama adat dan trdisi yang ada tidak bertentangan dengan syri'at Islam. Jika adat dan tradisi bertentangan dengan syariat Islam, maka kita harus mendahulukan Syri'at Islam dari pada adat istiadat yang telah di wariskan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jarjawi, Ahmad Ali, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2006)
- As-sayid Salim, Kamal Abu Malik bin Shahih *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007)
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Fiqhul mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)
- Anwar, Moh, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Surabaya- Al-Ikhlas, 1981)
- Hazairin, *Hukum kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadist*, (Jakarta: Tintamas, 19982)
- Idris Ramuho, Mohd, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- Mahmud Bably, Muhammad, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam* (Semarang: kalam Mulia, 1987)
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000)
- Rifa'i. H Mohd Drs, *Fikih Islam Lengkap*, CV Toha Putra Semarang. 1987
- Rahman, Radehur, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1981)
- Rasyd, Ibnu, Tahrij Ahmad Abdial Mojdi, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007)
- Salim, Omar, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani Press. 2005
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005),
- Sitompul, Anwar, *Dasar-dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Waris Islam* (Bandung: Armico, 1983)
- Soekarto, Sarjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Syaikh Al-bani, *Tuntunan Fiqih Islam*, Jakarta: Pustaka azzam, 2005

Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Simar Grafika, 1993)

Yunus, Muhammad, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1989)

Zainuddin, Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)